

e-news letter

APR II 2020

**PKS** PARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.**

# FRAKSI PKS KEBERATAN

DPR Tetap Membahas  
Omnibus Law



# Oh My God... Omnibus Law

Dengan keluarnya Perppu UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam penanggulangan wabah COVID-19, menunjukkan bahwa bahwa bagi Presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah covid. Maka RUU Omnibus Law Cipta Kerja harusnya tidak menjadi prioritas oleh Pemerintah untuk dibahas, kecuali jika keadaan telah membaik.

Entah apa yang ada dibenak mereka, siapapun itu yang ada di legislatif atau eksekutif. Dengan penuh gegap gempita memaksakan diri membahas RUU Omnibus Law di situasi krisis Wabah Covid 19. Apapun alasannya, rasanya rumit diterima dengan jiwa yang lapang dan sehat. Tidaklah mereka belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang ada, bahwa saat ini ratusan negara bergegas menghadirkan solusi kesehatan untuk memerangi covid 19, bukan Investasi. Bahkan ada satu negara Afrika pemimpinnya berkata "Kita Tahu Cara Memulihkan Ekonomi, Tapi Tidak Dengan Menghidupkan Orang". Benua yang seringkali dibilang dunia ketiga, bisa berpikir sangat rasional. Satu lagi, akhir tahun

lalu tidak ada yang menyangka bawa situasi akan memburuk seperti saat ini, maka harusnya jangan ada yang terlalu gegabah bahwa krisis ini akan berakhir dua sampai dengan tiga bulan kedepan.

Ironi tidak cukup sampai disitu, saat jumlah korban jiwa sudah mencapai angka 500 orang dengan bangganya seorang pejabat negara bertutur bahwa itu tidak seberapa dibandingkan dengan negara besar Amerika yang jauh lebih besar. Dia lupa bahwa ini adalah nyawa orang, bukan komoditas yang bisa diperbandingkan dan dikontestasikan. Dia belajar dari hal buruk, bukan hal baik dari sesuatu yang dekat. Sometimes the best practices can be found just next door. Tak perlu tengok Taiwan,

Singapura dan Korea Selatan, cukup Vietnam. Sebuah Negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, melaporkan ada 134 warga yang terinfeksi Virus Covid 19 dan tidak ada korban jiwa sejak wabah mulai melanda pada Januari 2020. Sementara Jerman (negara besar juga), angka terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan lebih dari 30.000 orang terinfeksi COVID-19, yang mengakibatkan 149 kasus kematian. **Intinya tidak usah jauh-jauh cari pelajaran.**

Omnibus Law menjadi satu-satunya antithesis penyelesaian Covid 19 dari sebuah negara, yang lain serius bikin dekrit dan peraturan penanganan Kesehatan. Dinegeri ini bergegas mencari cara "aji mumpung" dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan menyusun regulasi yang penuh kontroversi atas nama investasi. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak pembahasan RUU Omnibus Law di Badan Legislatif karena situasi dan kondisi saat ini yang sedang menghadapi persoalan amat serius yaitu persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tegas dan jelas, meski harus



image : Istimewa

menempuh ruang hampa.

Penolakan FPKS dalam membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, paling tidak karena 3 (tiga) catatan penting, Pertama, bahwa Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Negara Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Wabah COVID-19 sebagai Bencana Nasional, menunjukkan bahwa Presiden RI menganggap kondisi yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat adalah sangat berat.

Kedua, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi besar. Hal ini antara lain karena rancangan undang-

undang ini dinilai tidak berpihak kepada kalangan buruh. Selain masalah dalam perspektif konstitusional. Ketiga, dengan keluarnya Perppu UU No mor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam penanggulangan wabah COVID-19, menunjukkan bahwa bahwa bagi Presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah covid. Maka RUU Omnibus Law Cipta Kerja harusnya tidak menjadi prioritas oleh Pemerintah untuk dibahas, kecuali jika keadaan telah membaik.

Alasan terakhir, kami serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa (Tawakal). Bisa jadi strategi politik belum terlalu canggih atau bisa jadi ini cara untuk belajar lebih giat lagi. Oh My God...



# PKS: KAMI KEBERATAN

DPR TETAP BAHAS RUU OMNIBUS LAW

Setidaknya ada 3 (tiga) catatan Penolakan Fraksi PKS dalam Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

## 1 STATUS BENCANA NASIONAL

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Negara Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Wabah COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

## 2 KONTROVERSI BESAR

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi besar. Hal ini antara lain karena rancangan undang-undang ini dinilai tidak berpihak kepada kalangan buruh. Selain masalah dalam perspektif konstitusional.

## 3 BUKAN HAL PRIORITAS

dengan keluarnya Perppu UU No mor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam penanggulangan wabah COVID-19, menunjukkan bahwa bahwa bagi Presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah covid. Maka RUU Omnibus Law Cipta Kerja harusnya tidak menjadi prioritas oleh Pemerintah untuk dibahas,

“

Wabah ini akan menjadi lebih buruk jika pemerintah dan DPR kurang memberi perhatian

Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.  
Anggota Baleg DPR RI



# DPR Berkeras Membahas Omnibus Law, PKS: Kami Keberatan!

Idealnya produk undang-undang yang berspektrum sangat luas dibahas melibatkan seluas\_luasnya masukan publik maupun pakar, dalam situasi yang nyaman tidak dalam situasi kekhawatiran wabah

**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (14/4) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak pembahasan RUU Omnibus Law di Badan Legislatif karena situasi dan kondisi saat ini yang sedang menghadapi persoalan amat serius yaitu persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketua Poksi Badan Legislatif DPR RI Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan:

"Dari hari kehari keadaan ini semakin memburuk, jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat bahkan sampai dengan sore kemarin jumlah kasus tersebut hampir mencapai angka 5000 kasus dengan jumlah kematian yang lebih tinggi dari yang sembuh"

Ketua DPP PKS ini menjelaskan bahwa wabah

Covid-19 telah berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Covid 19 juga mengakibatkan jatuhnya pertumbuhan ekonomi dan anjaknya nilai rupiah.

"Wabah ini akan menjadi lebih buruk jika pemerintah dan DPR kurang memberi perhatian" kata Al Muzammil Yusuf.

Penolakan FPKS dalam membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menurut Almuzammil paling tidak karena 3 (tiga) catatan penting:

Pertama, bahwa Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Negara Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Wabah COVID-19 sebagai Bencana Nasional, menunjukkan bahwa Presiden RI menganggap kondisi yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat adalah sangat berat.

"Penyebaran COVID-19 yang telah berdampak luas diseluruh dunia dan haruslah benar-benar ditanggulangi secara baik dan efektif.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menyatakan bahwa pandemi ini dari waktu kewaktu terus menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar" terang Al Muzammil Yusuf.

Kedua, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi besar. Hal ini antara lain karena rancangan undang-undang ini dinilai tidak berpihak kepada kalangan buruh. Selain masalah dalam perspektif konstitusional.

"Idealnya produk undang-undang yang berspektrum sangat luas dibahas melibatkan seluas\_luasnya masukan publik maupun pakar, dalam situasi yang nyaman tidak



dalam situasi kekhawatiran wabah" jelas Al Muzammil Yusuf.

Ketiga, dengan keluarnya Perppu UU No mor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam penanggulangan wabah COVID-19, menunjukkan bahwa bahwa bagi Presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah covid. Maka RUU Omnibus Law Cipta Kerja

harusnya tidak menjadi prioritas oleh Pemerintah untuk dibahas, kecuali jika keadaan telah membaik." ujar Al Muzammil Yusuf.

Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI menyatakan keberatan untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasannya hingga Presiden RI secara resmi mengumumkan berakhirnya Wabah Covid-19 di Indonesia

## Giliran PKS Tolak Bahas RUU Ciptaker

# Adang Daradjatun: Kesannya Seperti Cari-cari Kesempatan

Jika pemerintah termasuk DPR dalam hal ini Baleg tetap memaksakan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker, maka sama halnya tidak memiliki rasa belas kasih terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Bahkan, akan timbul kesan pembahasan RUU tersebut mencari kesempatan di tengah pandemik corona.

### **Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (14/04) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas meminta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker (Ciptaker).

Sebab RUU kontroversial itu dinilai bukan menjadi prioritas saat pandemik virus corona. Begitu disampaikan anggota Fraksi PKS, Adang Daradjatun saat Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah, Selasa (14/4).

"Ada kontroversi di

masyarakat, idealnya dibahas setelah masukan masyarakat, maka DIM (daftar inventarisasi masalah) fraksi-fraksi setelah mendengar masyarakat. Maka, urgensi Omnibus Law tidak prioritas," kata Adang Daradjatun.

Menurut dia, jika pemerintah termasuk DPR dalam hal ini Baleg tetap memaksakan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker, maka sama halnya tidak memiliki rasa belas kasih

terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Bahkan, kata Adang Daradjatun, akan timbul kesan pembahasan RUU tersebut mencari kesempatan di tengah pandemik corona.

"Kalau dilanjutkan maka enggak ada empati dan memanfaatkan situasi. Berdasarkan catatan itu, kami keberatan Omnibus Law Ciptaker dan meminta penundaan hingga presiden mengumumkan Covid-19 berakhir," pungkasnya



# Ini Alasan Mengapa Fraksi PKS Keberatan Bahas RUU Omnibus Law

lebih baik kita gunakan semua daya upaya dan pemikiran kita untuk menghindari bangsa ini dari pandemi Covid 19 lebih dulu. Setelah semua aman dan kondusif baru kita bicarakan hal lain yang dianggap perlu

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI

Tangerang Selatan (15/04) — Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (14/04), Fraksi PKS secara resmi menyatakan keberatan membahas RUU Omnibus Law.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga anggota (Baleg), Mulyanto, menyebutkan sedikitnya ada tiga alasan kenapa Fraksi PKS minta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja ini.

"Pertama, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Jumlah korban terus meningkat dan wilayah yang terkontaminasi virus corona

makin meluas", ungkapnya.

Bahkan, kata Mulyanto, melalui dua Keppres yang dikeluarkan Presiden menyatakan secara tegas bahwa kondisi negara saat ini ada dalam tahap "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" dan masuk fase "Bencana Nasional".

"Fraksi PKS menimbang dalam kondisi darurat seperti ini seharusnya Pemerintah dan DPR fokus mengerahkan semua daya upaya untuk mengatasi persebaran Covid 19", tegasnya.

Kedua, lanjut Mulyanto, ini adalah RUU yang berat substansinya, terkait dengan lebih dari 70 UU. Beberapa

pasal dalam RUU Omnibus Law menimbulkan kontroversi, stigma negatif dan penolakan masyarakat.

"RUU ini dianggap lebih memperhatikan kepentingan pengusaha dan mengurangi hak pekerja termasuk juga dengan jaminan produk halal", papar Mulyanto.

Karena itu, Mulyanto menambahkan, Fraksi PKS menilai RUU ini perlu dibahas secara terbuka dan luas, serta melibatkan banyak pihak.

Sehingga diperlukan waktu dan ruang publik yang cukup dan suasana yang kondusif, agar semua aspirasi dapat didengar dengan seksama", imbuhnya.

Alasan ketiga, ungkap Mulyanto, Pemerintah baru saja menerbitkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanggulangan Covid 19 dan Krisis Sistem Keuangan.

Dalam Perppu tersebut terdapat sejumlah pasal dan ketentuan yang secara substansi sama dengan isi RUU



Omnibus Law. Sehingga secara tidak langsung telah mereduksi beberapa bagian RUU Omnibus Law yang akan dibahas.

"Jadi berdasarkan tiga alasan itu Fraksi PKS keberatan membahas RUU Cipta Lapangan Kerja", ujarnya.

Bagi Fraksi PKS, tambah Mulyanto, RUU Omnibus Law itu bukan prioritas utama untuk dibahas. Tidak harus segera.

"Api Corona ini kita padamkan dulu. Kita lalu dulu dengan selamat krisis ini, baru setelah itu kita bahas soal omnibus law tersebut," tegas Mulyanto.

Justru yang lebih penting

dilakukan Pemerintah saat ini, kata Mulyanto, adalah melaksanakan isi Perppu, Keppres, Kepmen dan aturan lain yang terkait dengan penanggulangan Covid 19 secara optimal. Agar bangsa ini dapat segera keluar dari pandemi Covid 19 ini. Ini soal nyawa kita.

"Jadi lebih baik kita gunakan semua daya upaya dan pemikiran kita untuk menghindari bangsa ini dari pandemi Covid 19 lebih dulu. Setelah semua aman dan kondusif baru kita bicarakan hal lain yang dianggap perlu," kata Anggota Komisi VII DPR RI ini.

ALASAN FRAKSI PKS KEBERATAN  
BAHAS RUU OMNIBUS LAW



yang lebih penting dilakukan Pemerintah  
saat ini adalah

# MELAKSANAKAN ISI PERPPU, KEPPRES, KEPMEN DAN ATURAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN COVID 19 SECARA OPTIMAL

Agar bangsa ini dapat segera keluar dari pandemi  
Covid 19 ini. Ini soal nyawa kita.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Baleg DPR RI



# HNW Sampaikan Aspirasi WNI Korban Corona di LN ke Mensos dan Menlu

Saya sudah sampaikan aspirasi mereka (WNI di luar negeri) baik melalui surat maupun melalui forum rapat DPR dengan menteri, Alhamdulillah responsnya positif. Kedua Menteri Luar Negeri dan Menteri Sosial menjanjikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang sesuai untuk WNI di LN,

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (10/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan aspirasi WNI korban COVID-19 di luar negeri kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Sosial (Mensos). Ia meminta kedua Kementerian tersebut dapat berkolaborasi untuk memenuhi kewajiban negara terhadap WNI yang berada di Luar Negeri, khususnya kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mahasiswa yang juga menjadi korban Covid-19 di negara-

negara tempat mereka bekerja atau belajar.

“Saya sudah sampaikan aspirasi mereka (WNI di luar negeri) baik melalui surat maupun melalui forum rapat DPR dengan menteri, Alhamdulillah responsnya positif. Kedua Menteri Luar Negeri dan Menteri Sosial menjanjikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang sesuai untuk WNI di LN,” kata HNW di sela-sela rapat kerja virtual DPR RI dengan mitra di Jakarta (8/4/2020).

Hal itu dibahas saat rapat kerja bersama DPR RI, Selasa (7/4/2020). Sebelumnya, HNW sudah menyampaikan aspirasi para WNI, terutama mahasiswa dan pekerja migran di luar negeri kepada dua kementerian tersebut melalui surat resmi tanggal 27 Maret lalu.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan pemerintah melalui Kemenlu berjanji untuk mengoptimalkan komunikasi, pemantauan, pemetaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap WNI di setiap negara terkait dengan penanganan COVID-19 baik melalui media offline maupun online. Sementara itu, Kemensos akan membangun sinergi dan sinkronisasi program perlindungan sosial dengan Kemenlu.

Hingga Rabu (8/4/2020), ada 286 WNI di luar negeri yang positif COVID-19. Pemerintah sudah membangun RS khusus di Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau untuk menampung WNI dari luar negeri yang positif COVID-19, termasuk TKI dari Malaysia dan Singapura.



# Ketua Fraksi PKS DPR Apresiasi Pembentukan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI

Fraksi PKS sejak awal sudah membentuk Tim Penanganan Covid-19 Fraksi PKS (TPC-FPKS) yang diketuai Dr. Netty Prasetyani dan kita saat itu mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Fraksi-Fraksi di DPR untuk bersama-sama membantu para tenaga medis yang kekurangan APD dan masyarakat luas yang luar biasa terpukul ekonominya karena covid-19

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (13/4) - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah pimpinan DPR membentuk Satgas Lawan Covid-19. Ini menunjukkan sensitivitas dan kepedulian DPR untuk bersama-sama menangani Covid-19 dengan menghimpun dan menyalurkan bantuan langsung berupa APD dan paket kebutuhan masyarakat.

"Fraksi PKS mengapresiasi

inisiatif pembentukan Satgas Lawan Covid-19 DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Bahkan seharusnya tim atau satgas ini dibentuk sejak awal munculnya kasus Covid-19 sebagai bentuk keberpihakan DPR kepada rakyat," ungkap Jazuli.

Fraksi PKS DPR sendiri sudah sejak awal kasus bergulir menginstruksikan anggotanya dengan berbagai langkah dan

gerakan, mulai dari gerakan bagi masker dan disinfektan gratis, lalu disambung potong gaji bulan maret untuk APD tenaga medis, disambung lagi potong gaji bulan April untuk paket sembako bagi warga. Dan seterusnya gerakan anggota Fraksi PKS masih berjalan hingga saat ini di dapilnya masing-masing.

"Fraksi PKS sejak awal sudah membentuk Tim Penanganan Covid-19 Fraksi PKS (TPC-FPKS) yang diketuai Dr. Netty Prasetyani dan kita saat itu mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Fraksi-Fraksi di DPR untuk bersama-sama membantu para tenaga medis yang kekurangan APD dan masyarakat luas yang luar biasa terpukul ekonominya karena covid-19. Alhamdulillah jika sekarang pimpinan dewan merespon dengan membentuk satgas penggalangan dan penyaluran bantuan," kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini berharap Satgas pembentukan DPR ini bisa menggalang bantuan



signifikan dari para anggota DPR dan pihak-pihak yang peduli sehingga bisa secara konkrit dan signifikan membantu kebutuhan APD bagi tenaga medis dan rumah sakit serta kebutuhan pokok khususnya bagi para pekerja informal dan harian yang terputus penghasilannya akibat kebijakan PSBB dan physical distancing.

"Saatnya kita semua berkolaborasi bahu membahu membantu rakyat dan pahlawan medis untuk menghadapi

wabah ini. Lebih dari itu, dengan momentum ini kita berharap DPR hadir langsung mengatasi dampak covid-19. Tentu sesuai kewenangan kita juga berharap energi dan pikiran DPR dicurahkan untuk mengarahkan dan mengawasi kebijakan pemerintah agar efektif mengatasi laju penyebaran wabah covid-19 sehingga wabah ini segera bisa diakhiri," pungkas Jazuli.

Wakil Ketua Komisi I DPR :

# Pemerintah Wajib Lindungi Semua WNI Termasuk di Luar Negeri

Tidak cukup jika kita hanya membagikan sembako kepada warga Indonesia yang paling terdampak oleh pemberlakuan MCO, semua WNI harus mendapat perlakuan yang sama, karena kita bertanggung jawab keselamatan dan hidup mereka. Opsi evakuasi dan penyediaan tempat karantina sementara WNI yang pulang juga semua hal terburuk harus Pemerintah Indonesia siapkan

**Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (14/04) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada Pemerintah RI khususnya Mitra Komisi 1 DPR RI Kementerian Luar Negeri, untuk mengambil langkah strategis dan cepat dalam melindungi semua WNI yang ada di Luar Negeri yang terkena

dampak Covid-19.

"Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dilindungi hak-haknya sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak terkecuali di dalam atau luar negeri dan berdasarkan undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa

Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional apalagi dalam pandemik ini jadi kita wajib dan harus melindungi semuanya," jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media, Selasa (14/04/2020).

Kharis yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, bahwa terkait hal perlindungan WNI maka Pemerintah Indonesia harus siap dengan skenario terburuk seperti kondisi di negara tetangga Malaysia yang dimana terdapat 3,5 juta WNI didalam penguncian wilayah atau movement control order (MCO) hingga 28 April 2020 dan bisa jadi diperpanjang untuk menekan penyebaran virus corona di Malaysia.

"Tidak cukup jika kita hanya membagikan sembako kepada warga Indonesia yang paling terdampak oleh pemberlakuan MCO, semua



WNI harus mendapat perlakuan yang sama, karena kita bertanggung jawab keselamatan dan hidup mereka. Opsi evakuasi dan penyediaan tempat karantina sementara WNI yang pulang juga semua hal terburuk harus Pemerintah Indonesia siapkan," terang Kharis.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga meminta, bahwa saatnya sinergi semua pihak terutama diplomat para Duta Besar kita dimana banyak WNI yang berada didaerah pandemik Covid-19 untuk langsung memimpin semua upaya penyelamatan, evakuasi, pemberian bantuan dan semua hal yang diperlukan untuk

keselamatan WNI di Luar Negeri.

"Kita harapkan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional semua Duta Besar kita menyikapi sama untuk menjaga WNI di Luar Negeri yang terdampak Pandemi Covid-19 karena berdasarkan data Kemenlu sudah 374 WNI yang tersebar di 28 Negara dinyatakan positif, ini sangat menjadi perhatian kami di Komisi 1 DPR RI," tutup Kharis.

# Toriq Minta Kemenlu Lindungi WNI Terdampak Covid-19 dengan Deteksi Dini

"Saya minta Negara untuk mendatangi langsung para korban. Kehadiran dan perhatian negara pasti memberikan ketenangan kepada para korban dan keluarganya, Karena ketenangan adalah setengah dari kesembuhan," tambahnya.

## KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (13/04) — Toriq Hidayat, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam dalamnya kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban covid 19.

"Menurut Kementerian Luar Negeri, hingga hari ini (12/04/20) terkonfirmasi jumlah WNI yang menjadi korban covid 19 sebanyak 366 orang, meninggal dunia sebanyak 9 orang dan sembuh sebanyak 55 orang" ujar Toriq. Kementerian Luar negeri

memberikan informasi bahwa 9 orang WNI yang meninggal dunia terdiri dari 2 orang WNI bermukim di Amerika Serikat, Yang lainnya, 2 orang bermukim di Belanda, 2 orang bermukim di Malaysia, 2 orang bermukim di Singapura dan 1 orang bermukim di Inggris.

Anggota Komisi I DPR RI ini, meminta kepada Negara dalam hal ini Kementerian luar negeri untuk hadir memberikan Perlindungan kepada seluruh WNI korban Positif covid 19 yang berada di Luar Negeri. Baik yang dalam perawatan, meninggal dunia dan yang

sembuh.

"Saya minta Negara untuk mendatangi langsung para korban. Kehadiran dan perhatian negara pasti memberikan ketenangan kepada para korban dan keluarganya," ungkap Toriq.

"Karena ketenangan adalah setengah dari kesembuhan," tambahnya. Dalam Peraturan Menteri No. 05 tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia, Pasal 2 disebutkan Pelindungan terhadap WNI meliputi pencegahan, deteksi dini dan respon cepat oleh Pemerintah.

Maksud Pencegahan adalah pemerintah melakukan penguatan regulasi, kampanye penyadaran publik, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama. Sedangkan Deteksi dini adalah pemetaan risiko, mitigasi risiko, dan rencana kontijensi.

Kemudian Respons adalah menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat, mengkaji secara cepat dan tepat



permasalahan yang dihadapi WNI, menetapkan langkah penanganan permasalahan, dan melaksanakan penanganan permasalahan.

"Kementerian Luar Negeri adalah garda terdepan dalam pelindungan WNI di luar negeri. Saya berharap kemenlu intensif berkomunikasi dengan seluruh WNI dan Pemerintah Negara

setempat dalam penanganan Covid 19 agar WNI korban covid 19 mendapatkan pelayanan terbaik dan dapat meminimalisir jatuhnya korban baru", ujar Toriq.

"Semoga wabah yang mendunia ini segera berliku dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah SWT", tutup Toriq penuh harap.

## WNI di Malaysia Terdampak Lockdown

# DPR: Terapkan Strategi Taktis Selamatkan Mereka

Pemerintah mesti berpikir solusi ke depan dan berpikir menghadapi kondisi terburuk, seandainya MCO ini akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, misalkan pemu-langan TKI secara masif dan bertahap. Jangan sampai nama Indonesia tercoreng karena dianggap menelantarkan warganya di Malaysia

### H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (12/04) — Sekitar 3.5 juta WNI terdampak Covid-19 di Malaysia yang menerapkan lockdown / MCO (movement control order) sejak 18 Maret lalu, menjadi perhatian Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS.

"Saya mendengar di masa MCO ini kondisi WNI di Malaysia sangat sulit. Kebanyakan mereka bekerja di sektor informal dan kebanyakan diputus kontraknya. Akibatnya, yang bekerja harian lepas, praktis tidak ada pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Apalagi

MCO ini sudah diperpanjang ketiga kalinya hingga akhir April, dan kemungkinan masih akan diperpanjang. Oleh karena itu, perlu segera diterapkan strategi taktis menyelamatkan WNI dalam kondisi yang tidak menentu ini. Pemerintah mesti berpikir solusi ke depan dan berpikir menghadapi kondisi terburuk, seandainya MCO ini akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, misalkan pemulangan TKI secara masif dan bertahap. Jangan sampai nama Indonesia tercoreng karena dianggap

menelantarkan warganya di Malaysia." ujarnya melalui sambungan telepon.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menambahkan bahwa mereka ini tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai kondisi.

Ada diantara WNI yang hari -hari ini bertahan dengan makan roti tawar saja atau bahkan air kran saja. Sebagian ada yang lari ke hutan dan kebun mencari umbi-umbian yang masih bisa dimakan untuk bertahan hidup. Kita dalam kondisi seperti ini tidak mempedulikan status WNI legal atau ilegal, yang penting mereka termasuk tumpah darah Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dari negara.

"KBRI dan KJRI sudah memberikan bantuan sembako, tetapi jumlah bantuan masih sangat jauh dari kebutuhan berdasar jumlah WNI yang memerlukan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Sukamta melanjutkan bahwa pihaknya mengapresiasi Kementerian Luar Negeri



(Kemlu RI.

"Bu Menlu Retno dan jajarannya sudah peka terhadap persoalan ini dan bekerja serius melindungi WNI di sana, misalnya dengan membagikan paket sembako. Tapi sepertinya Kemlu RI perlu lebih cepat dan masif lagi bergerak di lapangan. Kemlu RI juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk NGO-NGO untuk menjangkau WNI yang memerlukan," katanya.

"Khususnya, Saya berharap Pak Dubes Rusdi Kirana bisa memimpin langsung

dan menunggui proses penyelamatan anak-anak bangsa yang terpaksa mencari nafkah di negeri orang ini. Dulu waktu fit and proper test di DPR, Pak Dubes sempat menangis karena terharu dengan TKI kita di Malaysia dan tergerak untuk membantu. Nah, inilah saat yang tepat untuk mewujudkan keinginan beliau tersebut," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Anggota DPR RI :

# Perpres APBN No 54/2020 Inkonstitusional, Langkah Kewenangan Legislatif

Seharusnya para ahli hukum di Istana dapat memberikan masukan yang baik untuk presiden, jangan sampai nanti rakyat melihat langkah yang diambil presiden ini inkonstitusional. Karena publik melihat apa yang digariskan konstitusi kita tidak ditaati oleh Presiden

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (11/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy merespon penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya sangat menyayangkan jika presiden diberikan masukan untuk menerbitkan Perpres untuk APBN. Saya bisa memahami, Pemerintah perlu kerja cepat untuk menangani Corona, dan sebenarnya DPR

siap melakukan akselerasi dalam pembahasan anggaran", ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe menambahkan Secara prinsip semua pembahasan UU dan Anggaran memang seharusnya fokus untuk tangani Corona.

"Kesampingkan dulu pembahasan yang tidak terkait corona seperti Omnibus Law maupun anggaran untuk Ibu Kota. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama kita,"

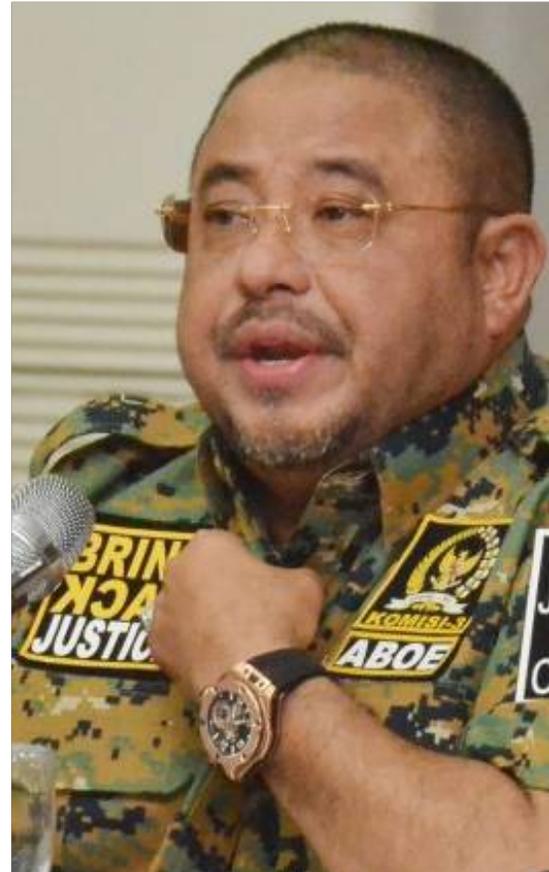
tegas Ketua Badan Kehormatan Dewan ini.

Disinilah, kata Habib Aboe, diperlukan sinergitas Pemerintah dan DPR untuk mengatur kebijakan secara akseleratif.

"Perlu dilihat kembali konstitusi kita, pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa APBN itu direncanakan oleh Presiden dan dibahas bersama dengan DPR," terangnya.

Artinya, kata Aboe Bakar Al-Habsy, setelah disusun oleh Pemerintah, APBN perlu dibahas bersama dengan parlemen. Selain itu pada pasal 23 ayat 1 dikatakan bahwa APBN itu ditetapkan dengan UU, bukan dengan Perpres.

"Seharusnya para ahli hukum di Istana dapat memberikan masukan yang baik untuk presiden, jangan sampai nanti rakyat melihat langkah yang diambil presiden ini inkonstitusional. Karena publik melihat apa yang digariskan konstitusi kita tidak ditaati oleh Presiden," tutup Bendahara FPKS ini.



PBB Ingatkan Covid-19 Ancam Pangan Global



# OPTIMALKAN PRODUKSI DALAM NEGERI

“

Mulai sekarang pemerintah harus berpikir bagaimana caranya membenahi produksi dalam negeri. Bagaimana caranya pula persediaan produk petani kita bisa diserap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi seperti sekarang. Negeri kita kaya, selama pemerintah orientasinya kesejahteraan petani dan kemandiriannya bukan untung rugi (berdagang). Jangan ada intervensi kepentingan pengusaha yang hanya cari untung. Kita bisa

**drh.H. Slamet**

Anggota Komisi IV DPR RI

Langkanya Gula Akibat Covid-19,

# Slamet: Benahi Industri Gula Dalam Negeri!

sudah saatnya pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian, bijak melihat hal ini dan mulai serius membenahi infrastruktur penopang industri gula dalam negeri. Slamet menyebut, lahan perkebunan tebu dan petani tebu harus diperhatikan dengan serius. Tak hanya itu, pabrik gula dan teknologi pembuatan gula juga patut untuk diperhatikan

## drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (10/04) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, menyoroti kelangkaan komoditas gula dalam beberapa waktu terakhir ini. Tak dipungkiri, kelangkaan komoditas gula tersebut memang disebabkan oleh dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 yang kian hari kian terasa oleh masyarakat.

Slamet menilai, dalam situasi seperti ini pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani dengan melindungi

produksi dalam negeri. Pasalnya, kebiasaan pemerintah yang memudahkan impor di saat stok tidak tersedia dan kurang memaksimalkan pemberdayaan pertanian dan produsen dalam negeri, akan terasa akibatnya ketika impor tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Pendemi ini mendunia termasuk dialami negara produsen, sehingga merekapun tidak mampu menutupi kebutuhan dalam negerinya alih-alih mengekspor ke negara

lain. Komoditas gula hari ini sudah mulai langka di pasar, padahal gula termasuk barang pokok dan penting. Saya khawatir pemerintah juga tidak mampu menutupi kebutuhan pasar melalui impor," kata Slamet, Jumat (10/04/2020).

Slamet mengatakan, sudah saatnya pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perindustria, bijak melihat hal ini dan mulai serius membenahi infrastruktur penopang industri gula dalam negeri. Slamet menyebut, lahan perkebunan tebu dan petani tebu harus diperhatikan dengan serius. Tak hanya itu, pabrik gula dan teknologi pembuatan gula juga patut untuk diperhatikan.

"Menteri Perdagangan memastikan membeli semua stok gula atau produk dalam negeri berapapun harganya. Bila perlu, pemerintah mensubsidi sambil memperbaiki kinerjanya sehingga bisa menekan harga di masa depan sampai bahkan kita bisa bersaing dengan negara lain dan menjadi negara pengekspor bukan pengimpor lagi," jelas Slamet.



Terakhir Slamet mengungkapkan, jika kita gagal bersikap negarawan dalam berbagai sisi bidang, maka kita sedang berkontribusi pada kehancuran bangsa kita sendiri. Pemerintah Soeharto, sambung Slamet, menyebutnya dengan ketahanan pangan.

"Pemerintah Jokowi menyebut lebih gagah dengan

kedaulatan pangan. Tapi jika semuanya hanya sebatas slogan dan impor yang menjadi primadonanya, maka bangsa dan negara akan menjadi taruhannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia tercinta," tutupnya.

Foto : dpr.go.id

# Aleg PKS: Polemik Impor Buah Bukti adanya Kejanggalan Penerapan Aturan

Saya menegaskan, agar impor buah jangan sampai dimonopoli. Satu pemilik tapi perusahaannya banyak. Ini kan yang mengancam kondisi harga buah sekaligus memicu persaingan usaha yang tidak sehat, izin impor buah harus berdasarkan data yang valid dan neraca kebutuhan buah dalam negeri. "Kalau memang kebutuhan dalam negeri kita kurang, kita impor,

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (08/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS yang membidangi pertanian, Andi Akmal Pasluddin membeberkan, pada awal pekan April 2020, berbarengan dengan situasi negara sedang berusaha menyelamatkan diri dari wabah covid-19, sedang terjadi situasi kurang kondusif pada sektor hortikultura kita.

Komoditas buah-buahan, menurut Akmal, yang tergolong pada produk hortikultura mulai berkembang polemiknya akibat impor dan proses perizinannya. Kondisi ini membuktikan dan membuka mata semua pihak,

bahwa selama ini telah terjadi kurang disiplin dalam penerapan kebijakan, sehingga seolah-olah pemerintah terlihat memihak pada golongan atau perusahaan tertentu untuk diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan buah.

"Saya menegaskan, agar impor buah jangan sampai dimonopoli. Satu pemilik tapi perusahaannya banyak. Ini kan yang mengancam kondisi harga buah sekaligus memicu persaingan usaha yang tidak sehat," katanya.

Andi Akmal menegaskan, bahwa izin impor buah harus berdasarkan data yang valid dan neraca kebutuhan buah dalam negeri. "Kalau memang kebutuhan dalam negeri kita kurang, kita impor," kata Andi kepada wartawan.

Politisi PKS ini menjelaskan, bahwa sebenarnya RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 banyak pihak yang mengkritisi termasuk sejumlah rekannya di Komisi IV DPR. Namun beberapa asosiasi dan pengusaha importir hortikultura ada sebagian yang menanggapi dengan positif mengingat kondisi saat ini sedang serba sulit dalam menghadapi wabah di negara kita.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini menambahkan, perlu ada upaya kekompakkan dalam menjalankan regulasi yang relatif sensitif terutama berhubungan dengan hajat hidup petani negara kita. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan di masyarakat yang belum mampu dipenuhi dari dalam negeri menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai.

Protes yang dilayangkan



sejumlah pihak dari Luar Negeri, kata Akmal, akibat berbagai kecurigaan ada permainan perdagangan di Indonesia, dengan dominannya salah satu pelaku usaha.

Akmal membeberkan, Kini telah terjadi saling curiga antar pelaku impor. Kecurigaan itu berupa persepsi Siapa yang dekat dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan), dia dapat kuota izin, padahal tidak memenuhi kewajiban. Sedangkan yang sudah bersusah payah memenuhi kewajiban berupa memiliki areal tanam dalam

negeri untuk membantu petani tidak dapat SPI.

"Saya berharap, pemerintah perlu memberikan ketegasan regulasi yang memihak rakyat banyak dalam hal ini para petani kita. Mesti dihitung secara cermat penerapan kelonggaran regulasi impor, Relokasi APBN dan situasi berkembang di masyarakat akan kebutuhan pangan. Terjadi kekeliruan tindakan, Pemerintah yang akan di salahkan, dan rakyat tidak tau harus kemana untuk mengadu", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# Anggota FPKS Cek Gudang Bulog Sumbar, Pastikan Persediaan Pangan Aman

Alhamdulillah, cadangan beras di Bulog Sumatera Barat cukup untuk mengantisipasi Covid dan kebutuhan selama Ramadhan. Setiap bulan Bulog mengeluarkan 2500-3000 ton beras. Jadi stok saat ini cukup untuk kebutuhan 3 sampai 4 bulan kedepan

## **Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sumbar I

Padang (12/04) — Anggota DPR dari Dapil Sumbar mengadakan kunjungan ke Gudang Bulog Sumbar Rawang Timur, Kota Padang.

Kunjungan ini dalam rangka melihat dari dekat ketersediaan beras dalam mengantisipasi wabah Covid 19 dan kecukupan menjelang bulan suci Ramadhan.

"Alhamdulillah, cadangan beras di Bulog Sumatera Barat cukup untuk mengantisipasi Covid dan kebutuhan selama

Ramadhan", ungkap Hermanto. Saat ini, jelasnya, stok beras Bulog Sumbar sebanyak 10.000 ribu ton.

"Setiap bulan Bulog mengeluarkan 2500-3000 ton beras. Jadi stok saat ini cukup untuk kebutuhan 3 sampai 4 bulan kedepan", papar legislator FPKS dari Komisi 4 DPR ini.

Dalam kunjungan ke gudang Bulog tersebut, Hermanto diterima oleh Kepala Bulog Divisi Regional (Divre)

Sumatera Barat Tommy Despalingga beserta jajarannya.

Tommy menyebutkan, disamping stok beras yang ada sekarang, pihaknya mengajukan ke pusat agar mendapat tambahan sehingga stok bisa mencapai 14.000 ton.

"Tugas utama Bulog adalah menjaga stabilitas harga beras dan jangan sampai di pasar tidak ada beras", ucap Tommy



# Johan Harap Bulog Pastikan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga saat Covid-19

Gejolak harga pangan, khususnya beras terjadi akibat peningkatan harga beras di konsumen mencapai 5% atau lebih terhadap HET yang berlangsung. Bulog untuk segera melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pada saat kondisi darurat wabah Covid-19 ini

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (09/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan, menyampaikan agar Bulog segera meningkatkan kerjanya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, terutama menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan pokok dalam situasi pandemic wabah Covid-19 sekarang ini.

"Ada tiga pilar yang harus dipertankan Bulog secara maksimal pada kondisi saat ini, yakni pilar ketersediaan pangan dengan melaksanakan kebijakan pembelian pangan, teras pilar keterjangkauan dengan cara pemerataan stok nasional dan pilar stabilitas yang dilakukan dengan menjaga stabilitas

harga di tingkat petani dan konsumen", ungkap Johan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Perum Bulog Kamis, (09/04).

Anggota DPR RI dari dapil NTB 1 ini mengungkapkan bahwa peran Bulog sangat strategis dalam menjaga agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selalu mencukupi dan berada dalam rentang 1-1,5 juta ton.

"Secara keseluruhan stok awal beras tahun 2020 sebesar 4,51 juta ton, dan perkiraan produksi beras nasional sampai April 2020 sebesar 4,95 juta ton, serta diperkirakan kebutuhan beras per bulan adalah 2,5 juta ton," sebut Johan.

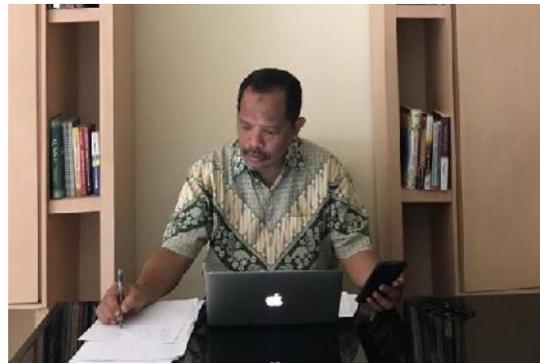
Kepada Bulog, Johan mengingatkan agar segera menyiapkan berapa ton target pengadaan beras dalam negeri untuk menyerap hasil panen petani bulan April 2020 ini untuk penyediaan stok serta kebijakan penyalurannya dalam situasi wabah Covid-19 ini.

"Sejak 2019 Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan sistem penggantian dalam rangka menjaga stok CBP berada pada 1-1,5 juta ton, CBP ini dapat digunakan untuk bantuan social dalam penanganan pandemic wabah Covid-19," ujar Johan.

Legislator dari PKS ini menekankan agar Bulog segera mengambil langkah sistematis pengelolaan CBP khusus untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19.

"Dari Bulog karena telah dianggarkan melalui Perppu No. 1/2020 tentang dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp 25 Triliun, serta kartu sembako yang dinakikan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima," papar Johan.

Anggota Legislatif dari Pulau Sumbawa ini menekankan bahwa hal yang perlu diantisipasi adalah gejolak harga pangan



pada masa pandemic covid-19 ini, sehingga diperlukan operasi stabilisasi harga pangan dan ketersediaan pasokan.

"Gejolak harga pangan, khususnya beras terjadi akibat peningkatan harga beras di konsumen mencapai 5% atau lebih terhadap HET yang berlangsung. Bulog untuk segera melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pada saat kondisi darurat wabah Covid-19 ini", tegas Johan.

Johan mempertanyakan bagaimana posisi persediaan

beras dan logistik lainnya serta sebarannya di seluruh provinsi di Indonesia per hari ini untuk mendukung ketahanan pangan dalam masa pandemic Covid-19, serta tentang rencana penyaluran PSO dalam situasi wabah Covid-19 sekarang ini, terutama tentang kapasitas penyaluran untuk penanganan bencana pandemic, dan penyaluran bansos rastra.

"Semoga Bulog memperbaiki kerjanya demi Ketahanan Pangan kita dalam situasi pandemic wabah Covid-19 ini", tutup Johan

Program Padat Karya Dijalankan,

# Sigit: Presiden Harusnya Jamin *Physical Distancing*

proyek padat karya lebih pas dilaksanakan pasca wabah. Jika dilaksanakan saat masih pandemi justru dikhawatirkan menjadi sarana penyebaran Covid-19 karena mayoritas warga saat ini tidak diketahui statusnya apakah positif terpapar virus corona ataukah negatif,

## Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (14/04) — Sebagai respon atas arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mempercepat program padat karya tunai.

Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan di tengah pandemi corona (Covid-19). Selain memberikan program padat karya tunai kepada masyarakat pedesaan, pemerintah juga memberikannya kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kembali ke kampung halamannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan,

program padat karya merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona.

Apalagi banyak pekerja khususnya yang di sektor informal mulai terkena PHK dan dirumahkan satu persatu.

Anggota DPR Komisi V, Sigit Sosiانتomo mempertanyakan program tersebut di tengah upaya menghentikan laju penyebaran Covid-19.

Menurutnya, proyek padat karya lebih pas dilaksanakan pasca wabah. Jika dilaksanakan saat masih pandemi justru

dikhawatirkan menjadi sarana penyebaran Covid-19 karena mayoritas warga saat ini tidak diketahui statusnya apakah positif terpapar virus corona ataukah negatif, Selasa, (14/04).

"Kita kan tahu minimnya rapid test Covid-19 yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah. Kita juga tahu sudah banyak perantau dari kota zona merah corona yang sudah pulang kampung. Kita juga tahu orang yang sudah terpapar virus corona belum tentu terlihat gejala-gejalanya. Jika orang terpapar virus corona tapi dirinya tidak tahu dan ikut di proyek padat karya kan bisa menular ke pekerja lainnya," urai Sigit.

Saat ini masih banyak keluhan di masyarakat bahwa masker banyak dibutuhkan tapi tidak tersedia. Demikian juga kurangnya baju kerja atau Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, apalagi tidak bisa diprediksi lagi jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP). Bahkan Puskesmas sudah mulai juga melakukan screening sampai pemeriksaan laboratorium. Legislator Fraksi PKS tersebut justru minta agar Pemerintah



fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

"Masker dan handsanitizer harus terjamin ketersediaan dan distribusinya ke setiap warga negara Indonesia dengan harga terjangkau. APD harus terjamin ketersediaan dan distribusinya ke setiap rumah sakit. Oleh karena itu warga perkotaan yang terkena PHK perlu diberi insentif untuk diarahkan mengembangkan UMKM yang memproduksi masker dari kain, hand sanitizer, desinfektan dan APD sebagai senjata melawan Covid-19," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian PUPR akan menggelontorkan anggaran Rp 10,22 triliun untuk program padat karya tunai. Padat karya tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

# Sulitnya Pengawasan, Aleg Fraksi PKS Minta Permenhub 18/2020 Dicabut

Saya berpendapat bahwa profesi ojek online seharusnya menjadi salah satu yang berhak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah. Apalagi profesi ojek online telah terdaftar secara baik dalam database, maka apabila pemerintah memiliki niat baik untuk membantu pengemudi ojek online seharusnya mudah bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuannya

## H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (12/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyoroti penerbitan Permenhub No. 18 Tahun 2020 oleh Kementerian Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut pria yang akrab disapa SJP, dalam Permenhub tersebut diatur tentang pengoperasian kendaraan umum

termasuk ojek online (ojol).

"Pada pasal 11 ayat 1 huruf c ditegaskan bahwa ojol hanya dapat melakukan kegiatan pengantaran barang, namun pada huruf d diberikan pengecualian, bahwa dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol

kesehatan," ungkapnya.

Suryadi menambahkan, hal lain yang diatur seperti, pertama aktivitas yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar.

"Kedua, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan," imbuhnya.

Ketiga, lanjut Suryadi, menggunakan masker dan sarung tangan. "Dan keempat, tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit," pungkasnya.

Pengaturan ini, kata Suryadi, selain ambigu juga sangat sulit untuk diawasi pelaksanaannya dan jelas melanggar Permenkes no.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

"Dimana pada pasal 13 ayat 10 disebutkan bahwa moda transportasi baik umum maupun pribadi dibatasi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak



antar penumpang," paparnya.

Kedua kriteria inilah, lanjut SJP, yang seharusnya menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dalam menetapkan suatu peraturan untuk pelaksanaan PSBB.

"Dalam kaitannya dengan ojek online sebagaimana diatur dalam Permenkes no.9 tahun 2020 menyebabkan kendaraan roda dua jelas tidak dapat digunakan untuk membawa penumpang karena ukurannya yang kecil," tegas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Karena status yang ada saat ini adalah berkaitan dengan darurat kesehatan, maka Suryadi berpendapat bahwa permenkes no.9 tahun 2020 harus didahulukan sehingga permenhub no.18 tahun 2020 tersebut melanggar Permenkes dan harus dicabut.

"Pelanggaran ini sekali lagi

membuktikan inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri dan juga memperlihatkan buruknya koordinasi antar lembaga," tegasnya

Namun demikian, kata SJP, akibat adanya pembatasan ini, tentu menyebabkan adanya penurunan pendapatan bagi pengemudi ojek online.

"Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa profesi ojek online seharusnya menjadi salah satu yang berhak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah. Apalagi profesi ojek online telah terdaftar secara baik dalam database, maka apabila pemerintah memiliki niat baik untuk membantu pengemudi ojek online seharusnya mudah bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuannya," tutup Suryadi.

SULITNYA PENGAWASAN, ALEG FPKS  
MINTA PERMENHUB 18/2020 TERKAIT  
TRANSPORTASI DICABUT



# Profesi ojol mestinya berhak dapat subsidi

"Dalam kaitannya dengan ojek online sebagaimana diatur dalam Permenkes no.9 tahun 2020 menyebabkan kendaraan roda dua kelas tidak dapat digunakan untuk membawa penumpang karena ukurannya yang kecil", tegas Anggota Komisi V DPR ini.

Karena status yang ada saat ini adalah berkaitan dengan darurat kesehatan, maka

Namun demikian, kata SJP, akibat adanya pembatasan ini, tentu menyebabkan adanya penurunan pendapatan bagi pengemudi ojek online.

"Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa profesi ojek online seharusnya menjadi salah satu yang berhak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah. Apalagi profesi

ojek online telah terdaftar secara baik dalam database, maka apabila pemerintah memiliki niat baik untuk membantu pengemudi ojek online seharusnya mudah bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuannya," tutup Suryadi.

“

Saya berpendapat bahwa profesi ojek online seharusnya menjadi salah satu yang berhak mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah. Apalagi profesi ojek online telah terdaftar secara baik dalam database, maka apabila pemerintah memiliki niat baik untuk membantu pengemudi ojek online seharusnya mudah bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuannya

**H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.**  
Anggota Komisi V DPR RI



Realokasi Anggaran 1,6 T,

# Kemenprin Perlu Menitik Beratkan Pada Pemulihan Sektor UMKM

Karyawan di PHK dan dirumahkan akibat 2 hal. Pertama Demand menurun drastis, yang kedua kebijakan Social Distancing akibat mewabahnya COVID tanpa perimbangan yang memadai dari institusi pemerintah baik pusat maupun daerah

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (07/04) — Usai rapat kerja Virtual antara DPR RI komisi VI dan Kementerian Perindustrian pada 6 April 2020, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuirina meminta secara khusus pada Kementerian Perindustrian untuk Penanganan Wabah Covid-19 dan Pemulihan Sektor Industri ini di titik beratkan pada usaha berskala mikro, kecil dan menengah.

Data yang dihimpun, di Jakarta saja, Sebanyak 16.065 pekerja di PHK dan 72.770

pekerja dirumahkan (Data Disnakertrans DKI Jakarta). Sedangkan di Jawa Timur ada 814 karyawan (1,48%) di PHK akibat pandemi Corona (data Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur). Di Jawa Tengah, 40 pabrik Industri dan perusahaan stop produksi (data APINDO Jawa Tengah).

"Karyawan di PHK dan dirumahkan akibat 2 hal. Pertama Demand menurun drastis, yang kedua kebijakan Social

Distancing akibat mewabahnya COVID tanpa perimbangan yang memadai dari institusi pemerintah baik pusat maupun daerah", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, industri yang paling terpuik akibat adanya pandemi covid-19 ini adalah Industri manufaktur seperti Pabrik garmen, tekstil, otomotif, elektronik yang selama ini menyumbang PDB sangat besar tahun 2019, sebesar 19,62 %. Namun yang langsung berdampak pada cashflow usaha sekaligus cashflow konsumsi rumah tangga adalah yang skalanya adalah UMKM.

"Pelaku usaha Mikro, Kecil dan menengah ini mempunyai karyawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pertengahan 2019 saja sekitar 58 juta UMKM di Indonesia. Semua pemilik UMKM maupun karyawannya, saat ini menghadapi situasi yang serba sulit. Hadirnya Kemenprin di tengah UMKM mesti menjadi penyelamat usa-



ha-usaha kecil ini", pinta Nevi.

Ketua forum UMKM Sumatera Barat ini mengingatkan pada semua pihak, bahwa pelaku UMKM ini sangat berat membayar karyawannya. Apabila pemberlakuan PSBB di suatu daerah, industri harus mematuhi protokol kesehatan bagi IKM, yang berarti ada beban tambahan berupa penyediaan fasilitas sterilisasi,

masker, handsanitizer dan lain sebagainya.

"Bantuan Pemerintah Harus hadir untuk sektor IKM untuk memenuhi beban tambahan yang sulit dipenuhi. Penyediaan Perlengkapan memenuhi protokol pencegahan virus akan memberikan kelancaran usaha sekaligus upaya pengurangan penyebaran covid-19 ini", tutup Nevi

# Anggota Fraksi PKS Minta Kemenperin Dorong Percepatan Produksi APD

Kami meminta perhatian khusus Pak Menteri Agus untuk menggesah Industri dalam negeri untuk mempercepat produksi APD serta alat-alat kesehatan lain yang diperlukan, kasihan kami mendengar masih banyak fasilitas kesehatan yang kekurangan APD, bagaimana mungkin kita membiarkan tenaga kesehatan kita bertempur tapi mereka tidak dibekali peralatan yang cukup,” ungkap Chairul.

## **Drs. CHAIRUL ANWAR Apt**

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (07//04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Chairul Anwar, meminta Kementerian Perindustrian menggesah atau mendorong Industri Dalam Negeri untuk mempercepat produksi Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga kesehatan yang lagi berjuang melawan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Chairul Anwar dalam Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI

dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Senin (06/04/2020).

“Kami meminta perhatian khusus Pak Menteri Agus untuk menggesah Industri dalam negeri untuk mempercepat produksi APD serta alat-alat kesehatan lain yang diperlukan, kasihan kami mendengar masih banyak fasilitas kesehatan yang kekurangan APD, bagaimana mungkin kita membiarkan

tenaga kesehatan kita bertempur tapi mereka tidak dibekali peralatan yang cukup,” ungkap Chairul.

Dalam rapat kerja virtual tersebut Menetri Perindustrian memaparkan mengenai kapasitas industri dalam negeri dalam memproduksi APD, obat-obatan, supplement dan hand sanitizer. Dari pemaparan tersebut menurut Chairul harusnya jika digesah oleh kementerian kebutuhan APD di dalam negeri bisa tertangani.

“Jika melihat pemaparan Pak Menteri seharusnya kapasitas industri dalam negeri kita bisa untuk memenuhi kebutuhan APD, cuma perlu langkah proaktif dari pemerintah dalam untuk mempercepat proses produksinya, koordinasi dengan industri harus dilakukan dengan intens, kita berikan mereka solusi terhadap kendala yang dihadapi industri dalam produksi, misalnya membantu koordinasi terhadap import bahan baku dengan Instansi pemerintah lainnya.” jelas Politisi PKS asal Riau ini.



Chairul juga meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk mengerahkan segala daya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

“Seluruh sumber daya kementerian harus dikerahkan untuk membuat peralatan untuk mencegah menyebarnya Covid-19, misalnya mengerahkan sekolah-sekolah kejuruan dalam lingkup Kementerian

Perindustrian untuk memproduksi Hand Sanitaizer. Kami juga meminta kementerian untuk bekerjasama dengan Industri kecil dalam memproduksi masker kain. Kami mengapresiasi langkah kementerian dalam hal ini. Semoga dengan langkah bahu membahu kita bisa menghadapi permasalahan Covid-19 ini,” tutup Chairul.

**Atasi Gelombang PHK,**

# Ini Saran Fraksi PKS untuk Pemerintah, Dunia Industri dan UMKM

Instrumen fiskal diberikan tepat sasaran dan tepat jumlah (anggarnya). Pilihan instrumennya adalah Pembebasan bea impor bahan baku bagi industri, insentif pajak dan subsidi harga khusus produksi UMKM,"

## **AMIN AK, M.M**

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyarankan Pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi dunia Industri dan pelaku UMKM ditengah wabah virus Corona (Covid-19). Hal tersebut dimaksudkan guna meminimalisir terjadinya PHK besar-besaran.

"Instrumen fiskal diberikan tepat sasaran dan tepat jumlah (anggarnya). Pilihan instrumennya adalah Pembebasan bea impor bahan baku bagi

industri, insentif pajak dan subsidi harga khusus produksi UMKM," kata Amin Ak kepada Jurnas.com, Kamis (09/04/2020).

Sasalnya, kata Amin Ak, Karyawan terkena PHK dan dirumahkan itu dikarenakan dua hal, pertama, karena permintaan (Demand) barang menurun secara drastis, kedua, karena adanya kebijakan Social Distancing akibat mewabahnya Covid-19.

"Pada pekan ke-4 sejak Kebijakan Pembatasan Sosial

diberlakukan, Gelombang PHK terus bermunculan," kata Amin

Menurut Amin, Industri manufaktur adalah yang pertama kali terpuak akibat wabah Covid-19, seperti pabrik garmen, tekstil, otomotif, dan elektronik. Mereka semua harus mengencangkan ikat pinggang.

Padahal, menjelang Ramadhan, industri manufaktur semestinya menggenjot produksi, tapi kini justru buruh libur bergantian, tidak ada lembur, sebagian dirumahkan dan di-PHK.

Hal ini menjadi kabar buruk bagi perekonomian Indonesia, sebab industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDB 2019, sebesar 19,62 persen. Menurunnya performa Industri manufaktur akan berdampak signifikan terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan akibatnya menurunkan lapangan kerja.

"Kondisi Industri seperti ini (dan diperkirakan akan terjadi



dalam waktu yang lama sepanjang tahun 2020), karena tidak ada satu pihak pun yang dapat memprediksi kapan wabah ini akan berakhir," katanya.

Tujuan mengatasi hal itu, Perusahaan, Industri atau bisnis apapun juga harus memiliki kelenturan (agility) pada produk dan berbagai varian barang produksi dan jasa.

Misalnya mengubah line productionnya dari garmen pakaian atau T-Shirt menjadi produksi APD dan masker.

Kemudian, dari Industri produksi mesin industri menjadi pengadaan alat ventilator.

"Atau Industri kimia yang memproduksi Handsanitizer, Vitamin dan lain-lain. Industri Perhotelan yang menyediakan kamar untuk isolasi bagi ODP

dan PDP," katanya.

Masih kata Amin Ak, sektor Industri juga perlu didorong untuk memproduksi kebutuhan tersebut, sehingga harga APD di masyarakat bisa lebih murah, roda ekonomi perusahaan jadi tetap berjalan dan ancaman PHK bisa diminimalisir.

Diketahui, akibat Wabah asal Wuhan, China, Bank Indonesia (BI) juga telah merevisi pertumbuhan ekonomi dari 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen, atau ada penurunan sekitar 1 persen.

Data International Labour Organization (ILO) menyebutkan, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 350 ribu-400 ribu tenaga kerja.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Harus Sesuaikan Harga BBM

Pemerintah jangan mau ambil untung saja dalam penyediaan BBM bagi rakyat. Ketika harga minyak dunia naik, harga BBM ikut naik. Tapi ketika harga minyak dunia turun, harga BBM malah tidak ikut turun.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (10/04) — Menyusul turunnya harga minyak mentah dunia di kisaran harga USD 20 perbarel, anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto, minta Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah harus komitmen dengan ketentuan yang dibuat sendiri bahwa harga jual BBM dalam negeri akan mengikuti mekanisme pasar minyak dunia. Sehingga ketika harga minyak mentah dunia anjlok dari kisaran USD 60 perbarel ke USD 20 perbarel seharusnya harga jual ke masyarakat juga harus disesuaikan.

"Pemerintah jangan mau ambil untung saja dalam

penyediaan BBM bagi rakyat. Ketika harga minyak dunia naik, harga BBM ikut naik. Tapi ketika harga minyak dunia turun, harga BBM malah tidak ikut turun.

PKS menagih komitmen Pemerintah dalam melayani rakyat. Kalau benar Pemerintah menetapkan harga jual BBM berdasar harga minyak dunia maka harusnya sekarang harga BBM sudah turun," tegas Mulyanto.

Mulyanto paham bahwa harga minyak dunia bukan satu-satunya variabel penentuan harga jual BBM. Masih ada variabel lain yang perlu dihitung, seperti perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan periode pembelian persediaan minyak mentah

untuk diolah sebagai BBM yang akan dipasarkan.

Namun, dengan penurunan harga minyak mentah dunia hingga 50% harusnya penurunan tetap dapat dilakukan meskipun pada saat yang sama nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sangat tinggi.

Sebab dalam perhitungan nilai jual BBM kepada rakyat, harga beli minyak dunia merupakan komponen utama yang sangat menentukan. Sementara komponen nilai tukar dan lainnya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan.

Mulyanto mengapresiasi program delivery service BBM yang dibuat Pertamina. Namun, yang lebih penting dari itu dan sangat ditunggu-tunggu masyarakat dalam kondisi seperti sekarang adalah kebijakan penurunan harga BBM.

"Penurunan harga BBM dalam negeri tersebut tentu akan membantu meringankan beban masyarakat di tengah wabah Covid-19 yang melanda Indonesia," tandas Mulyanto.



# Akibat Covid-19, Aleg PKS Minta PLN Gratiskan Listrik Tempat Ibadah

Pemerintah sebaiknya meng-gratiskan sarana ibadah (masjid, gereja dan vihara) dari kewajiban membayar tagihan listrik selama periode physical distancing, Dana-nya, lanjut Saadiah, dapat dialokasikan dari tambahan biaya dan belanja untuk penanganan Covid 19

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (10/04) — Kebijakan physical distancing dan edaran untuk melaksanakan ibadah di rumah menghindari wabah covid 19, sejumlah tempat ibadah sepi.

Namun, imbasnya, pengurus tempat ibadah tidak sanggup membayar rekening listrik. Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, di Jakarta (10/04).

Saadiah mencontohkan, di Pekanbaru, Pengurus Masjid At Taqwa kawasan Pasar Pusat, Jalan Hos Cokroaminoto

Pekanbaru, bingung mencari dana untuk membayar tagihan listrik masjid.

"Bantuan donasi dari jamaah selama ini dimanfaatkan antara lain untuk membayar tagihan listrik. Karena masjid kosong maka bantuan donasi jamaah juga menjadi nihil", tutur Saadiah.

Kondisi serupa juga melanda sejumlah tempat ibadah di berbagai daerah di Indonesia.

"Gereja, vihara juga kena imbas. Tanpa donasi dari yang datang beribadah, pengurus

mengalami kesulitan untuk operasionalisasi sarana ibadah seperti membayar tagihan", katanya.

Saadiah meminta agar pemerintah memberi perhatian kepada sejumlah sarana ibadah yang mengalami kesulitan membayar tagihan listrik karena terdampak kebijakan physical distancing.

"Pemerintah sebaiknya meng-gratiskan sarana ibadah (masjid, gereja dan vihara) dari kewajiban membayar tagihan listrik selama periode physical distancing", desak Saadiah.

Dananya, lanjut Saadiah, dapat dialokasikan dari tambahan biaya dan belanja untuk penanganan Covid 19.

Menurutnya, perhatian pemerintah berbentuk pembebasan pembayaran tagihan listrik kepada sarana ibadah merupakan kewajiban yang melekat.

"Sarana-sarana ibadah tidak memiliki siklus keuangan yang permanen. Kas sarana ibadah tersebut hanya akan terisi jika ada sumbangan



warga yang datang beribadah", jelas anggota Fraksi PKS.

Dengan edaran untuk kewajiban beribadah dilakukan di rumah, maka aktifitas ibadah di masjid, gereja maupun vihara juga terhenti.

"Cukup arif jika pemerintah juga turun tangan. Memberi kompensasi dengan membebaskan sarana ibadah dari kewajiban membayar tagihan listrik", harap Saadiah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***Bukhori: Kemenag Harus Menjadi Leading Sector untuk Tingkatkan Spiritualitas Umat***

*Saya mencermati bahwa Menteri Agama seperti kecolongan momentum mengambil inisiasi untuk menyuntikan optimisme kepada masyarakat di tengah ketakutan wabah. Berdasarkan keterangan Kepala BNPB pada Senin lalu, ia bahkan memprediksi jumlah kasus akan terus bertambah di kisaran angka 200.000 kasus sampai dengan bulan Juni ini. Pada sisi lain, Pemerintah juga mulai kewalahan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan materiil semata. Menteri Agama perlu segera menyuntikan stimulus untuk meningkatkan spiritualitas umat melalui edukasi yang positif dan narasi yang meneduhkan”*

***KH. Bukhori, Lc., M.A***

*Anggota Komisi VIII DPR RI*

# Bukhori: Kemenag Harus Menjadi Leading Sector untuk Tingkatkan Spiritualitas Umat

Kemenag cukup berfokus pada tupoksinya dalam hal penanganan dampak di masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejak adanya kebijakan untuk melakukan physical distancing, sebagian besar masyarakat memutuskan untuk melakukan isolasi di kediaman masing-masing

## **KH. BUKHORI, Lc., M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (09/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mendorong agar Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Leading Sector dalam memecahkan masalah dari dampak Covid-19.

Menurutnya, Kemenag cukup berfokus pada tupoksinya dalam hal penanganan dampak di masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejak adanya kebijakan untuk melakukan physical distancing, sebagian besar masyarakat memutuskan untuk melakukan isolasi di

kediaman masing-masing. Ia menambahkan, momentum ketika sebagian besar melakukan isolasi atau karantina di rumah adalah waktu yang penting untuk menyuntikkan stimulus spiritual kepada masyarakat melalui narasi agama.

“Saya mencermati bahwa Menteri Agama seperti kecolongan momentum mengambil inisiasi untuk menyuntikkan optimisme kepada masyarakat di tengah ketakutan wabah. Berdasarkan keterangan Kepala BNPB pada

Senin lalu, ia bahkan memprediksi jumlah kasus akan terus bertambah di kisaran angka 200.000 kasus sampai dengan bulan Juni ini. Pada sisi lain, Pemerintah juga mulai kewalahan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan materiil semata. Menteri Agama perlu segera menyuntikkan stimulus untuk meningkatkan spiritualitas umat melalui edukasi yang positif dan narasi yang meneduhkan” ujar Bukhori saat Rapat Kerja Virtual bersama Menteri Agama di Jakarta, Rabu (08/04/2020).

Lebih lanjut, Bukhori menambahkan pentingnya peran Menteri Agama untuk segera menjalin komunikasi efektif dan positif dengan seluruh tokoh agama, terutama mereka yang berada di luar ormas mengingat mereka memiliki pengaruh dan basis pengikut yang cukup besar.

Menurutnya, melalui keterlibatan dan kerjasama yang aktif antara umara dan ulama dalam menangani



persoalan bangsa akan mencerminkan satu potret yang lebih akurat dan damai di tengah masalah. Sehingga, lanjutnya, melalui keterlibatan kolektif tersebut diharapkan akan datang pertolongan Allah untuk mengangkak wabah ini.

Politisi PKS ini juga menyoroti tentang usaha untuk menjadikan masjid dan musala sebagai kawasan siap siaga Covid-19 sekaligus menjadi lumbung pangan bagi masyarakat di sekitarnya. Bukhori memandang, masjid dan musala memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat wabah ini.

“Sebagaimana kita ketahui, wabah ini diprediksi akan bertahan lama. Kita perlu

memperhatikan dengan serius dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat jika wabah ini berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Apalagi, kita tengah bersiap memasuki bulan Ramadhan. Saya mengusulkan, Kemenag perlu menyisir sejumlah anggaran di Kementerian yang dirasa tidak penting dan mendesak kemudian mendistribusikannya ke sejumlah masjid. Suntikan dana dari Kemenag ditambah dengan dana dari kas masjid akan sangat membantu pemerintah yang mulai kewalahan dalam mengatasi dampak Covid-19 ini.” tegas Bukhori.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Pemberian BLT Akibat Covid-19

# Iskan: Harus Sentuh Semua Keluarga Terdampak!

“Walaupun ini berdasarkan data terpadu di kemensos, atau data terpadu di dinas daerah setempat, tetapi program ini kan harus diluar dari keluarga yang mendapat bantuan program seperti PKH (program keluarga harapan), BNPT, ataupun kartu prakerja, artinya pemerintah harus double check dalam membuat list keluarga penerima Bansos ini

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (11/04) — Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat kecil yang membutuhkan selama masa darurat Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total penerima Bansos dari pemerintah pusat di Jabodetabek mencapai 4,1 juta jiwa.

Pemerintah sendiri menyiapkan beberapa Bansos. Pertama Bansos khusus

presiden dalam bentuk sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga yang diberikan selama 3 bulan.

Selain itu ada bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu. BLT ini juga diberikan kepada masyarakat di luar Jabodetabek. Angka penerima diperkirakan mencapai 9 juta jiwa.

Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mendukung usaha pemerintah dalam meringankan beban bagi

masyarakat yang terdampak musibah ini.

“Saya dukung, dan segera di distribusikan secepatnya, bukan hanya di wilayah jabodetabek saja, tapi di seluruh wilayah, semoga dapat terdistribusi secara merata” paparnya.

Selain itu, Iskan juga menekankan agar pemerintah betul-betul selektif dalam pendistribusiannya kepada keluarga yang terdampak.

“Walaupun ini berdasarkan data terpadu di kemensos, atau data terpadu di dinas daerah

setempat, tetapi program ini kan harus diluar dari keluarga yang mendapat bantuan program seperti PKH (program keluarga harapan), BNPT, ataupun kartu prakerja, artinya pemerintah harus double check dalam membuat list keluarga penerima Bansos ini,” pungkasnya.

Politisi PKS kelahiran Sibuhuan ini juga mengatakan BLT ini juga harus menyentuh seluruh lini sektor yang terdampak musibah.

“Supir angkot, pengemudi ojek online, buruh bangunan,



pedagang kaki lima, pekerja yang dirumahkan tanpa digaji oleh perusahaannya, dan sebagainya,” tandas Iskan.

Lebih lanjut Iskan menambahkan, masyarakat miskin sudah jelas akan menerima bansos tersebut, tetapi ingat, banyak kaum menengah yang diprediksi akan masuk kedalam golongan kategori miskin di Indonesia bila pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat.

“Stimulus Rp 405,1 T yang direncanakan pemerintah, dan Rp 110 T diantaranya akan

digunakan untuk Jaringan sosial atau Bansos harus tepat sasaran dan akuntabel. Jangan sampai ada pihak yang coba-coba memancing di air keruh.

Saya dan rekan Komisi VIII lainnya akan mengawasi dan memastikan program ini bisa menyentuh seluruh lini sektor yang terdampak musibah. Mari bersama-sama kita kurangi beban Rakyat ditengah pandemi Virus Covid-19 ini” tutup Iskan.

# BLT untuk 7,5 Juta Terdampak Covid-19, Nurhasan: Jangan Salah Sasaran !

“Pemerintah harus mensosialisasikan ini sedetail-detainya, terutama sasaran utama dari program-program tersebut yakni diprioritaskan untuk masyarakat yang terdaftar DTKS. Jangan sampai masyarakat terluka dan merasa diberikan angin surga. Khawatir menimbulkan kegaduhan dan konflik sosial, ini harus diantisipasi”

## H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (07/04) — Pemerintah dalam hal ini kemensos harus cepat dan jeli menentukan sasaran penerima manfaat bantuan sosial, terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin dan rentan yang belum mendapatkan program PKH dan Sembako untuk penanggulangan masyarakat terdampak Covid-19.

Hal tersebut di sampaikan Nurhasan Zaidi, Anggota DPR RI Komisi 8 dari Fraksi PKS, seusia mengikuti rapat virtual antara Komisi VIII dengan mensos, Selasa (07/04/2020).

Selain realokasi anggaran

Kemensos, rapat tersebut juga membahas penugasan khusus Kementerian Sosial RI oleh presiden untuk menangani program social safety net bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dalam paparannya mensos menjelaskan bahwa dari dana Stimulus Penanganan Covid-19 sejumlah 405 T yang digulirkan pemerintah, sebesar 110 T dialokasikan untuk dana Jaring Pengaman Sosial.

Dari angka 110 T tersebut, selain untuk subsidi listrik dan kartu prakerja, kemensos menegalokasikannya dalam

bentuk penambahan Kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan manfaat sebesar Rp200.000,- selama 9 bulan, serta PKH disalurkan kepada 10 juta KPM, yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun.

Kemensos juga menggulirkan program khusus Sembako untuk DKI Jakarta sebagai wilayah episentrum Covid-19 dan skema BLT untuk 7,5 KPM dengan nilai 600.000 rupiah perbulan.

“Kita apresiasi langkah kemensos yang sigap merefocusing program anggaran kementerian untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dimasa \_social distancing\_ saat ini. Semua harus dilakukan dengan cepat tapi jangan sampai salah sasaran, untuk itu kita minta 7,5 juta KPM BLT harus benar-benar teralokasikan dengan benar, kita akan terus kawal ini”, ujar Nurhasan.

“Kita coba fahami alasan kemensos menggunakan DTKS sebagai rujukan utama sasaran untuk program Bansos tersebut. Tetapi pemerintah juga harus ingat bahwa banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS banyak juga yang



terimbas dan rentan jatuh miskin dalam kondisi sekarang, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah”, lanjutnya.

Terkait dengan harapan masyarakat umum atas statement pemerintah tentang bantuan-bantuan ini, Nurhasan menegaskan bahwa jangan sampai masyarakat salah persepsi sehingga menimbulkan konflik sosial dan kegaduhan yang pada akhirnya menurunkan kewibawaan

pemerintah.

“Pemerintah harus mensosialisasikan ini sedetail-detainya, terutama sasaran utama dari program-program tersebut yakni diprioritaskan untuk masyarakat yang terdaftar DTKS. Jangan sampai masyarakat terluka dan merasa diberikan angin surga. Khawatir menimbulkan kegaduhan dan konflik sosial, ini harus diantisipasi”, pungkasnya.

# MEDIA CENTER COVID-19

## OPINI

Dimuat di Kumparan | Sabtu 11 April 2020

# Pemerintah yang Gagap Menghadapi Pandemi Global COVID-19

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



# Pemerintah yang Gagap Menghadapi Pandemi Global COVID-19



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (11/04) — Penyebaran virus corona (Covid-19) semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Sampai dengan 10 April 2020 atau sebulan lebih seminggu setelah kasus pertama diumumkan Presiden, jumlah yang positif terpapar dalam data yang dirilis Gugus Tugas Covid-19 telah mencapai angka 3.512 kasus.

Dari jumlah itu, 306 orang meninggal dunia. Pada tanggal 9 April juga tercatat penambahan kasus per hari

terbesar yaitu sebanyak lebih dari 300 kasus positif.

Ini semua adalah data resmi yang dilansir oleh pemerintah. Jumlah kasus meninggal juga berdasarkan data yang sudah terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan hasil swab dengan PCR dan tidak termasuk yang meninggal dalam status Pasien Dalam Pemantauan (PDP) atau yang masih menunggu hasil pengujian dengan PCR.

Banyak pihak pun meyakini, kasus positif Covid-19

yang unreported dan jumlah yang sebetulnya terjadi, jauh lebih besar dari yang dilansir pemerintah.

## Antara Gamang Kebijakan dan Terlalu Percaya Diri

Presiden secara resmi mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Namun, sebetulnya banyak pihak meyakini bahwa Covid-19 sudah masuk di Indonesia dan sudah ada penduduk Indonesia yang terjangkit Covid-19.

Namun, alih-alih mendengarkan masukan berbagai pihak, pemerintah baik melalui Menteri Kesehatan maupun berbagai pihak, justru bersikeras mengatakan kasus Covid-19 belum ada dan tidak ada di Indonesia.

Pada 15 Februari misalnya, peneliti dari Harvard University sudah mengatakan bahwa Covid-19 sudah masuk di Indonesia. Namun, ungkapan peneliti dari Harvard ini dibantah oleh pernyataan Menteri Kesehatan.

Menkes malah menantang peneliti tersebut untuk menunjukkan bukti bahwa

Covid-19 sudah masuk Indonesia. Padahal, Harvard dikenal sebagai lembaga pendidikan bergengsi di dunia.

WHO sejak 30 Januari juga sudah menetapkan 2019-nCoV sebagai public health Emergency of International Concern (PHEIC) yang berarti semua negara perlu memberikan perhatian serius terhadap penyebaran virus Corona ini. Namun, saat itu Indonesia belum menunjukkan perhatian dan kewaspadaan yang tinggi terhadap merebaknya Covid-19 ini.

LP3ES bahkan menilai pemerintah terkesan menolak

peringatan-peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan penelitian-penelitian berbagai universitas dunia bahwa Covid-19 bisa saja menyerang Indonesia.

Upaya memulangkan WNI yang berada di Wuhan yang menjadi pusat penyebaran wabah covid-19 pada 2 Februari 2020 juga baru dilakukan setelah adanya tekanan kuat dari berbagai pihak. Apalagi, beberapa negara juga mengevakuasi warganya dari Wuhan dan berhasil dilakukan. Awalnya, di media, Menkes I menunjukkan keengganan untuk melakukan

WHO sejak 30 Januari juga sudah menetapkan 2019-nCoV sebagai public health Emergency of International Concern (PHEIC) yang berarti semua negara perlu memberikan perhatian serius terhadap penyebaran virus Corona ini. Namun, saat itu Indonesia belum menunjukkan perhatian dan kewaspadaan yang tinggi terhadap merebaknya Covid-19 ini.

# Pemerintah yang gagap ... (lanjutan 1)



PEMAKAMAN PROSEDUR COVID 19

Foto: istimewa

evakuasi dengan bertanya bagaimana cara mengevakuasinya, karena di Wuhan diberlakukan lock down.

Setelah beberapa negara terbukti berhasil mengevakuasi warganya, barulah pemerintah RI bergerak menjemput WNI di Wuhan dan membawanya ke Natuna untuk menjalani karantina.

Penempatan di Natuna sebagai lokasi karantina pun awalnya menimbulkan polemik karena terkesan tidak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang keberatan.

Selanjutnya, pada 27 Februari 2020, pemerintah Arab Saudi sudah memasukkan Indonesia dalam negara yang jemaah umrahnya dilarang masuk. Dengan kata lain,

pemerintah Arab Saudi sudah meyakini bahwa sudah ada kasus Covid-19 di Indonesia.

Namun, inipun dibantah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang masih berusaha melobi agar jemaah umroh dari Indonesia tetap diizinkan masuk ke Arab Saudi.

Berbagai pernyataan petinggi negara bahkan justru meniadakan belum masuknya covid-19 ini sebagai bahan candaan dari mulai corona belum masuk karena izin yang sulit, penduduk Indonesia senang minum jamu, makan nasi kucing, melawan corona dengan goyang TikTok dan sebagainya.

Bahkan, ketika dari dalam negeri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan tentang ancaman Covid-19

Jumlah kasus menenggal juga berdasarkan yang sudah terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan hasil swab dengan PCR dan tidak termasuk yang menenggal dalam status Pasien Dalam Pemantauan (PDP) atau yang masih menunggu hasil pengujian dengan PCR.

dengan menunjukkan peningkatan jumlah pasien disertai gangguan paru-paru dan pneumonia di rumah sakit-rumah sakit Jakarta dan mengingatkan untuk membatasi kedatangan dari luar, justru dibantah oleh Menteri Kesehatan.

Di saat yang sama, Singapura juga mengajukan komplain karena penambahan kasus positif covid-19 di negaranya adalah imported case, atau berasal dari mereka yang baru datang dari Indonesia. Sehingga, patut diduga di Indonesia sudah banyak orang terjangkit Covid-19.

Akhirnya, Presiden baru mengumumkan kasus pertama Covid-19 secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan imported case yang berasal dari

WNA Jepang yang menghadiri sebuah acara di Jakarta dan menularkan Covid-19 ke warga Depok yang mengikuti acara tersebut.

Setelah diumumkannya kasus pertama tersebut, sampai hampir 2 minggu, tidak ada kebijakan pemerintah yang signifikan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus SARS-Cov 2 ini. Pemerintah justru lebih menonjol berusaha menenangkan masyarakat untuk tidak panik dengan lebih mengkampanyekan bahwa Covid-19 ini bisa disembuhkan, fatality rate yang rendah yaitu hanya 3 persen, bisa minum jamu untuk memperkuat daya tahan dan sejenisnya.

Berbagai pernyataan yang dibuat lebih mengarahkan pada

upaya kuratif, padahal dengan status pandemi, membutuhkan tindakan preventif atau pencegahan yang bisa dikatakan ekstrem seperti yang dilakukan di berbagai negara. Apalagi, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan beberapa kota memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

## "Pembatasan Pendatang yang Serba Tanggung"

Kebijakan pembatasan pendatang dari luar juga belum ketat dilakukan. Pembatasan yang dibuat pemerintah pada 2 Maret 2020 baru terbatas pada pendatang yang berasal dari penerbangan langsung dari China Mainland dan 2 wilayah di Korea. Sementara pendatang dari China yang merupakan sumber penyebaran Covid-19 melalui negara lain (transit) maupun pendatang dari negara lain yang sudah terjangkit Covid-19 tidak dilakukan pembatasan.

Bahkan pemerintah justru sibuk mempromosikan daerah tujuan wisata di Indonesia untuk mengundang wisatawan dari luar datang ke Indonesia dengan berbagai diskon dan didukung buzzer untuk ikut mempromosikan. Padahal, negara-negara lain sudah mulai melakukan pembatasan



# Pemerintah yang gagap ... (lanjutan 2)

kedatangan orang dari luar.

Baru pada 20 Maret, ketika jumlah orang yang terjangkit covid-19 semakin banyak dan pertambahan per hari juga sudah menunjukkan grafik yang eksponensial, pemerintah baru memperketat kedatangan dari luar negeri.

Melalui pernyataan menteri Luar Negeri, Indonesia membuat kebijakan untuk tidak mengizinkan pendatang dari negara yang sedang terjangkit covid-19 cukup parah seperti Italia, Vatikan, Spanyol, Jerman, Swiss, Prancis, dan Inggris.

Indonesia juga untuk sementara tidak menerima visa on arrival dan bebas visa diplomatik untuk membatasi kedatangan dari negara-negara tersebut.

Pembatasan ini pun masih dirasakan tanggung dan sangat kurang, mengingat negara-negara tetangga sudah melakukan pembatasan kedatangan dari luar yang sangat ketat, bahkan penumpang yang transit pun dilarang. Sementara dengan pembatasan yang dibuat Indonesia, masih memungkinkan pendatang dari luar negeri khususnya WNA dari China untuk masuk ke Indonesia selama bukan berasal dari penerbangan langsung dari China atau masuk

melalui pelabuhan laut dan penyebrangan.

Media pun memberitakan kedatangan WNA asal China yang tetap masuk ke beberapa daerah yang kedatangannya melalui transit atau penyebrangan di saat pembatasan sudah dilakukan.

## Maju Mundur Penerapan Karantina Wilayah

Lambannya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga terlihat dalam menetapkan status keadaan penyebaran Covid-19 untuk menentukan tindakan selanjutnya. Sejak 10 Maret 2020, WHO yang memantau persebaran Covid-19 di seluruh dunia sudah mengingatkan Pemerintah Indonesia agar segera

menetapkan Status Darurat Nasional terhadap wabah Covid-19.

Ini adalah peringatan WHO yang kesekian kalinya kepada Indonesia dalam menyikapi kebijakan pemerintah Indonesia yang lambat. Namun, baru pada 16 Maret Pemerintah melalui Presiden, akhirnya menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional.

Sayangnya, itupun belum ada aturan yang tegas terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, khususnya dalam mencegah penyebaran dan perluasan wabah Covid-19.

Pemerintah hanya menyerukan imbauan untuk melakukan social distancing dan physical distancing serta menghindari kerumunan. Sekali lagi, ini masih bersifat imbauan.

Padaحال, banyak pihak terutama kalangan medis sudah menyerukan agar Indonesia melakukan lock down atau Karantina Wilayah dengan menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Bahkan ketika Pemda DKI membuat pembatasan mobilitas dengan mengurangi operasional transportasi publik yang dikelolanya seperti Bus Transjakarta, MRT dan LRT untuk mengurangi kedatangan ke Jakarta dan mobilitas warga, justru mendapat teguran dari pemerintah pusat dan meminta kebijakan tersebut dibatalkan.

WHO juga meminta Pemerintah Indonesia menambah laboratorium untuk melakukan pengujian infeksi positif Covid-19 dengan PCR, mengingat potensi yang tertular

di Indonesia sangat besar dengan pembatasan mobilitas dan berkumpul manusia yang masih belum tegas.

Saat itu, hanya satu Laboratorium yang diizinkan melakukan pengujian dengan PCR. Padahal, ada beberapa laboratorium di Jakarta maupun daerah lain yang sudah memenuhi persyaratan dan standar BSL 2 untuk bisa melakukan pengujian dengan PCR seperti Laboratorium Mikrobiologi FKUI, Laboratorium di Lembaga Eijkman yang sudah diakui dunia maupun Laboratorium di Balai Kesehatan Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Baru pada tanggal 13 Maret akhirnya pemerintah menunjuk 10 Laboratorium lagi untuk bisa melakukan pengujian spesimen dengan



Merespons fenomena mudik yang terjadi dan memperhatikan dampaknya terhadap penyebaran Covid-19, beberapa kepala daerah justru lebih dulu menyampaikan himbauan seperti Gubernur Jakarta yang meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta ke daerah asal agar tidak menyebarkan virus corona ini ke daerah



# Pemerintah yang gagap ... (lanjutan 3)



ketika Gubernur Jakarta mengajukan untuk memberlakukan Karantina Wilayah ke pemerintah pusat, ditolak oleh Pemerintah Pusat. Penerapan Karantina Wilayah memang berimplikasi pada penyediaan kebutuhan logistik seperti pangan, obat-obatan kebutuhan pokok lainnya bagi warga di wilayah yang dilakukan Karantina Wilayah yang harus ditanggung pemerintah pusat.

metode PCR. Padahal, dengan 11 laboratorium ini pun, antrian spesimen untuk melakukan pengujian juga masih panjang dan petugas di Lab juga sudah kewalahan.

Apalagi, untuk bisa melakukan pengujian spesimen

dengan metode PCR dibutuhkan keahlian khusus. Belum lagi alat swab dan reagen yang juga stoknya terbatas untuk mendukung pengujian.

Padahal kecepatan pengujian ini sangat penting untuk memastikan seseorang

yang masih berstatus suspect covid-19, PDP atau bahkan ODP apakah positif terjangkit atau tidak, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.

Ditambah lagi, sudah mulai banyak ditemukan mereka yang masih berstatus PDP kemudian tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia karena keterlambatan atau kurangnya penanganan.

Mereka yang meninggal saat berstatus PDP ataupun yang saat ini berstatus PDP atau ODP bisa jadi sebelumnya sudah positif terjangkit Covid-19, sehingga harusnya mendapat penanganan khusus atau ditangani di ruang isolasi.

Masih tidak tegasnya kebijakan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang semakin meluas dan mencapai daerah-daerah lain di luar Jabodetabek, membuat berbagai kalangan sejak pertengahan Maret sudah meminta pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat terhadap pandemi Covid-19 ini.

Status Darurat Kesehatan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Mengatasi kondisi penyebaran covid-19 yang makin luas dan kurang

efektifnya imbauan untuk social distancing dan tetap di rumah, membuat status darurat kesehatan ini harus dilakukan dan bukan dengan menerapkan darurat sipil atau darurat militer.

Melalui Darurat Kesehatan Masyarakat ini, pelibatan kepolisian dan TNI harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, misalnya dalam jumlah terbatas dan bersifat perbantuan kepada otoritas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaannya.

Pemerintah baru menetapkan status Darurat Kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020. Penetapan ini diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pedoman teknisnya melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Penetapan darurat kesehatan ini sekaligus menunjukkan Pemerintah lebih memilih penerapan pembatasan melalui PSBB daripada Karantina seperti yang diharapkan banyak kalangan.

Di sisi lain, pemerintah daerah justru lebih berani dalam melakukan inisiatif-

inisiatif pembatasan yang mengarah ke spatial lock down seperti yang dilakukan oleh Wali kota Tegal, Wali kota Jayapura dan beberapa daerah lain.

Inisiatif lebih awal yang dilakukan daerah juga terlihat pada kebijakan sebelumnya ketika beberapa daerah lebih dulu memutuskan meliburkan sekolah saat ditemukan kasus positif Covid-19 seperti yang dilakukan Depok, Solo, Jakarta dan beberapa daerah lain.

## Gamang Pembatasan Mobilitas Warga dan Pemudik

Ketika penyebaran Covid-19 mulai meningkat cepat dan berbagai kebijakan juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, muncul permasalahan baru dalam pembatasan mobilitas, yaitu meningkatnya arus pemudik dari Jakarta dan kota sekitarnya ke daerah asalnya.

Merespans fenomena mudik yang terjadi dan memperhatikan dampaknya terhadap penyebaran Covid-19, beberapa kepala daerah justru lebih dulu menyampaikan himbauan seperti Gubernur Jakarta yang meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta ke daerah asal agar tidak menyebarkan virus corona ini ke daerah. Begitu pula

# Pemerintah yang gagap ... (lanjutan 4)

Gubernur Jawa Barat yang meminta agar warga tidak mudik. Seruan yang sama juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah.

Beberapa daerah juga mengambil inisiatif dengan melakukan isolasi terhadap pemudik yang baru datang dari daerah zona merah atau episentrum wabah Covid-19 ini, baik melakukan karantina mandiri maupun menyediakan tempat khusus di luar kota untuk melakukan karantina selama 14 hari.

Bagaimana dengan pemerintah pusat? Pemerintah justru menunjukkan koordinasi dan pernyataan yang berbeda antar pejabat dalam menyikapi fenomena pemudik ini. Presiden sempat menyatakan bahwa pulang kampung di saat wabah melanda ini berpotensi menyebarkan covid-19.

Namun, juru bicara Presiden Fadjoel Rachman malah menyatakan tidak ada larangan untuk melakukan mudik, tetapi di daerah harus melakukan isolasi. Pernyataan Fadjoel ini tak lama kemudian dibantah dan diklarifikasi oleh Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan Presiden tidak menyatakan membolehkan mudik. Presiden juga menyatakan bahwa mudik akan diganti setelah lebaran.



Jika PSBB yang diterapkan adalah seperti yang sudah dijalankan dalam beberapa hari setelah diterbitkannya PP tersebut, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan signifikan dengan yang sudah dijalankan khususnya oleh beberapa daerah sebelum dikeluarkannya PP tersebut

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sempat meminta agar terminal bus antar kota ditutup dari arus pemudik, yang kemudian direpon oleh Gubernur Jakarta yang meminta operasional bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang menuju dan dari Jakarta untuk stop operasional. Namun, permintaan larangan

operasional bus AKAP oleh Gubernur ini kemudian justru ditolak oleh Kementerian Perhubungan hanya dalam hitungan jam.

Ini tentu saja membingungkan dan membuat publik menilai ini masalah rebutan kewenangan. Terakhir Presiden menyatakan bahwa tidak melarang mudik, namun meminta daerah menyiapkan

protokol ODP bagi pemudik yang baru datang. Sekali lagi, akhirnya dibebankan kepada daerah

## PSBB yang serba Tanggung

Di tengah tekanan untuk melakukan lockdown atau menerapkan Karantina Kewilayahan dengan menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, dengan peningkatan kasus yang semakin cepat terutama di Jakarta, banyak pihak sudah meminta untuk dilakukan Karantina Wilayah minimal untuk DKI Jakarta atau diperluas sampai Jabodetabek yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

Bahkan, ketika Gubernur Jakarta mengajukan untuk memberlakukan Karantina Wilayah ke pemerintah pusat, ditolak oleh Pemerintah Pusat. Penerapan Karantina Wilayah memang berimplikasi pada penyediaan kebutuhan logistik seperti pangan, obat-obatan kebutuhan pokok lainnya bagi warga di wilayah yang dilakukan Karantina Wilayah yang harus ditanggung pemerintah pusat.

Hal ini pula yang diduga membuat pemerintah lebih memilih untuk mengambil kebijakan penerapan PSBB melalui Peraturan Pemerintah. Penerapan PSBB melalui PP ini kemudian memberi kesan menyramkan setelah Presiden dalam pernyataannya juga menyebutkan bahwa penerapan PSBB ini bisa diikuti dengan penerapan Darurat Sipil jika diperlukan.

Di sini, konsistensi dan koordinasi antar instansi pemerintah kembali diuji. Ketika Presiden menyatakan demikian, namun jajaran stafnya membuat pernyataan yang sedikit berbeda dengan mengatakan bahwa yang akan diterapkan adalah darurat kesehatan.

Pertanyaannya kemudian, PSBB seperti apa yang akan diterapkan? Dalam praktiknya, beberapa hari setelah PP tentang PSBB ini diterapkan, yang banyak disampaikan masih sebatas himbauan untuk melakukan pembatasan sosial seperti himbauan untuk tidak membuat acara yang mengundang orang banyak, membatalkan kegiatan setelah melakukan pendekatan persuasif dan belum terlihat adanya tindakan yang tegas.

Bahkan untuk pembatasan mobilitas orang antara kota

# Pemerintah yang gagap ... (Tamat)

untuk mencegah penyebaran covid-19 ini menunjukkan ketidakjelasan, inkonsistensi dan koordinasi yang buruk. Sebagai contoh, ketika BPTJ mengeluarkan pernyataan untuk menutup terminal bus antar kota, yang disrespon oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan operasional bus antar kota antar propinsi (AKAP), namun dalam hitungan jam, rencana itu ditolak oleh Kementerian Perhubungan.

Jika PSBB yang diterapkan adalah seperti yang sudah dijalankan dalam beberapa hari setelah diterbitkannya PP tersebut, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan signifikan dengan yang sudah dijalankan khususnya oleh beberapa

daerah sebelum dikeluarkannya PP tersebut.

Bahkan ketika Gubernur Jakarta membuat kebijakan yang lebih tegas untuk membatasi mobilitas penduduk dengan mengurangi perjalanan MRT, LRT dan Bus Transjakarta, diminta dibatalkan oleh pemerintah pusat. Padahal itu bertujuan untuk mengurangi warga untuk berpergian dan memang diperlukan shock therapy agar warga mau mengurangi kegiatan di luar secara bertahap, di tengah kebijakan yang masih ngambang.

PSBB juga dinilai kurang agresif dalam melakukan pembatasan pergerakan orang dan memaksa orang untuk tinggal di rumah

## PSBB yang Terlalu Prosedural

Permasalahan kedua dari implementasi PP tentang PSBB ini adalah pada birokrasi penetapan PSBB. PSBB baru bisa diterapkan dan dilakukan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari BNPB sebagai koordinator Gugus Tugas Penanggulangan Wabah Covid-19 dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Artinya masih dibutuhkan proses pembahasan atas pengajuan dari pemerintah daerah untuk bisa diberlakukan PSBB. Dalam sebuah kesempatan diskusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengatakan, minimal perlu waktu dua hari dari pengajuan oleh daerah sampai dengan penetapan oleh Kementerian Kesehatan.

Pengajuan PSBB yang disampaikan oleh daerah juga harus disertai dengan data-data penyebaran Covid-19 di daerahnya.

Prosedur penetapan PSBB ini jelas terlalu berbelit dan makan waktu. Apalagi, untuk mendapat persetujuan harus melalui tim kajian lintas bidang untuk menilai dari berbagai aspek. Padahal, daerah juga berpacu dengan waktu dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19 di



SUASANA JALAN PROTOKOL SAAT PSBB

Foto : istumewa

daerahnya. Belum lagi, sampai saat ini juga belum ada petunjuk teknis penerapan PSBB ini.

Dengan persebaran Covid-19 yang makin cepat dan meluas, jika dalam sehari misalnya ada 20 daerah saja yang mengajukan untuk penerapan PSBB, maka mungkin diperlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan persetujuan.

Ditambah lagi, tidak adanya kejelasan siapa yang harus menanggung berbagai implikasi yang timbul dari

penerapan PSBB. Ketika akan diberlakukan dengan tegas, siapa yang akan menanggung biaya operasional? Siapa yang akan menanggung biaya pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pemenuhan pendapatan yang hilang atau berkurang jauh.

Pilihan untuk menerapkan PSBB daripada karantina wilayah mengesankan pemerintah pusat mengalihkan beban biaya yang muncul kepada pemerintah daerah.

Prosedur penetapan PSBB ini jelas terlalu berbelit dan makan waktu. Apalagi, untuk mendapat persetujuan harus melalui tim kajian lintas bidang untuk menilai dari berbagai aspek. Padahal, daerah juga berpacu dengan waktu dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19 di daerahnya. Belum lagi, sampai saat ini juga belum ada petunjuk teknis penerapan PSBB ini

## Berkunjung ke RS Untan

# Alifudin Dukung Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan

dalam kondisi seperti ini kita juga patut berbangga, karena RS Untan ditunjuk sebagai pusat lab pemeriksaan sampel covid 19, dan kita juga akan segera koordinasi dengan gugus tugas covid 19 di pusat agar permintaan dari RS untan yang terdiri dari 23 item segera terpenuhi

### H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Pontianak (07/04) — Ditunjuknya Rumah Sakit Universitas Tanjungpura (RS Untan) Pontianak sebagai Rumah Sakit rujukan pasien Covid 19 dan Pusat Laboratorium pemeriksaan sampel Covid 19 untuk wilayah Kalimantan harus didukung dengan berbagai persiapan yang cukup matang. Selain APD, masker dan hal lain, peralatan dan bahan untuk kebutuhan laboratorium juga menjadi hal penting.

Dalam kunjungan kerja perorangan ke RS untan Pontianak, Selasa,

(07/04/2020), Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI langsung berdialog dengan Direktur RS Untan dr. Rangga Putra Nugraha, mengenai kebutuhan laboratorium yang berjumlah 23 item.

Alifudin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kemenkes juga dengan gugus tugas covid 19, karena semua kebutuhan daerah ada di pusat.

"iya, dalam kondisi seperti ini kita juga patut berbangga, karena RS Untan ditunjuk sebagai pusat lab pemeriksaan sampel covid 19, dan kita juga akan segera koordinasi dengan

gugus tugas covid 19 di pusat agar permintaan dari RS untan yang terdiri dari 23 item segera terpenuhi," Ujarnya.

Alifudin juga menambahkan kendala saat ini bukan pada anggaran, tetapi memang informasi dari kemenkes semua bahan-bahan lab susah untuk didapat.

"kita juga tahu, kondisi sekarang, bahan sangat susah, cuma tadi kata dr rangga dalam minggu ini bahan akan datang seadanya dulu, yah sesuai kebutuhan di RS untan selain itu juga tadi saya sampaikan agar nakes yang terlibat dalam pemeriksaan sampel covid 19 segera dilatih, agar bisa terstandarisasi," tambahnya.

Alifudin yang ditemani dr Rangga, juga melihat langsung lokasi lab dan alat pengujian sampel yang ada di RS Untan.



# Perpres 54/2020 terkait Perubahan APBN, Tak Hormati Proses Anggaran di DPR

melalui Perpres nomor 54/ 2020 ini, pemerintah seolah mengabaikan proses legal formal yang telah berlangsung dan berlandaskan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Anggota Fraksi PKS DPR ini menyoroti klaim pemerintah dalam Perpres 54/2020 yang mengatakan anggaran Kemendikbud naik 96 persen dari semula Rp. 36 T menjadi Rp. 70 T. Padahal sebelumnya, kenaikan anggaran Kemen-dikbud karena bergabungnya Kemenristek-Dikti adalah menjadi Rp. 77,152 T,”

## Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (13/04) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mengritisi penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang tidak menghormati proses pembahasan anggaran yang telah berlangsung di DPR sebelumnya.

“Khususnya ketika restrukturisasi di kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi mitra

komisi X DPR dilakukan semasa transisi pemerintahan dan kabinet baru kemarin,” kata Fikri di Semarang, Senin (13/04).

Fikri menyebutkan soal restrukturisasi di K/L yang menjadi mitra Komisi X DPR RI antara lain penggabungan urusan Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penggabungan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) deng-

an Kementerian Pariwisata.

“Penggabungan dan pemisahan tersebut otomatis berkonsekuensi perubahan anggaran, dan kita sudah berpekan-pekan membahasnya sesuai amanat Undang Undang tentang APBN 2020,” kata politisi PKS ini.

Fikri menyinggung soal ketentuan pasal 19 UU tentang APBN 2020 yang mengatur pengeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi K/L.

Namun, melalui Perpres nomor 54/ 2020 ini, pemerintah seolah mengabaikan proses legal formal yang telah berlangsung dan berlandaskan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Anggota Fraksi PKS DPR ini menyoroti klaim pemerintah dalam Perpres 54/2020 yang mengatakan anggaran Kemendikbud naik 96 persen dari semula Rp. 36 T menjadi Rp. 70 T.

“Padahal sebelumnya, kenaikan anggaran Kemendikbud karena bergabungnya Kemenristek-Dikti adalah menjadi Rp. 77,152 T,” imbuh Fikri.

Kalaupun kemudian Kementerian Ristek/ Badan Ristek Nasional (BRIN) menda-



pat alokasi anggaran Rp. 2,4 T, maka seharusnya Kemendikbud tetap mendapatkan sekitar Rp. 75 T. “Bukan Rp. 70 T, atau berarti dipotong hampir Rp. 5 T, bukan malah naik,” ucap Fikri.

Dirinya menyesalkan klaim bahwa anggaran Kemendikbud malah naik berdasar Perpres 54/2020. “Ini sih namanya pembohongan publik,” cetus Fikri.

Demikian pula dengan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Bapa-rekraf) RI, yang semula setelah restrukturisasi adalah Rp. 5,366 T.

“Namun di Perpres 54/2020 menjadi Rp.4,27 T atau dipotong Rp. 1 Triliun lebih,” ucap Fikri.

# DPR Ingatkan Pentingnya Jaminan Kesehatan dan Kesejahteraan Bagi Atlet

“Atlet semakin terbatas untuk bisa berlatih baik di klub atau di tempat pelatihan lain namun juga terhambat bila berlatih di rumah, misalnya saja karena keterbatasan fasilitas dan sekaligus bisa meningkatkan resiko cedera. Begitupula soal asupan gizi, bisa jadi terganggu bila kondisi ekonomi para atlet juga terganggu dalam situasi wabah ini

## Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (08/03) — Nasib atlet di Indonesia terkait jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang belum optimal menjadi keprihatinan Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah

“Sejak belum adanya situasi covid-19, keluhan para atlet terkait jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja memang sudah banyak,” ujar Ledia.

Mayoritas atlet misalnya tidak terlindungi asuransi kesehatan sehingga ketika mengalami cedera atau kecelakaan baik saat berlatih maupun bertanding tidak bisa

terkaver biaya berobatnya. Sebagian kecil atlet hanya memiliki asuransi kematian itupun terbatas pada wilayah atau klub pembinaan yang punya kerjasama khusus misalnya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Juga banyak sekali atlet yang belum mendapat apresiasi yang layak untuk menunjang kehidupan mereka utamanya pada cabang olahraga non-favorit.

“Itu sebabnya kita kerap mendengar kisah atlet yang setelah pensiun sulit memenuhi kebutuhan hidup, juga sulit

mencari bibit atlet karena banyak kekhawatiran orangtua akan nasib masa depan anak mereka pasca pensiun sebagai atlet.” Kata Ledia lagi

Kondisi para atlet ini menjadi lebih rumit setelah terjadinya situasi pandemik covid-19. Karena para atlet harus terus berlatih demi menjaga stamina dan skill mereka tetapi juga harus mengikuti protokol pandemik covid-19.

“Atlet semakin terbatas untuk bisa berlatih baik di klub atau di tempat pelatihan lain namun juga terhambat bila berlatih di rumah, misalnya saja karena keterbatasan fasilitas dan sekaligus bisa meningkatkan resiko cedera. Begitupula soal asupan gizi, bisa jadi terganggu bila kondisi ekonomi para atlet juga terganggu dalam situasi wabah ini,” lanjutnya

Karena itu ujar aleg FPKS ini KONI daerah maupun induk organisasi cabang olahraga sudah seharusnya menyiapkan prosedur pembinaan dan perlindungan yang maksimal bagi para atlet setidaknya dalam tiga hal, asuransi bagi atlet, jaminan kesejahteraan



serta lab mini kesehatan di tempat-tempat pelatihan untuk memastikan atlet terpantau kesehatannya sekaligus mengikuti prosedur penjagaan diri saat pandemik covid-19.

“Asuransi kesehatan ini harus ada karena resiko atlet cedera itu selalu ada. Apalagi dengan situasi pandemik covid-19 ancaman bagi para atlet juga bertambah. Harus dipastikan ada perlindungan bagi para atlet terkait kesehatan mereka.”

Terkait jaminan

kesejahteraan Ledia meminta KONI atau Induk Cabang Olahraga bisa mendata atlet terutama yang kehidupannya terdampak covid-19 untuk mendapat bantuan bagi diri mereka dan keluarganya. “Agar mereka tetap bisa menjaga stamina mereka, dan bisa tetap berlatih tanpa dibenturkan dengan situasi ekonomi keluarga yang serba kekurangan.”

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**Anis Byarwati:**

# Pemerintah Terlalu Terburu-buru Terbitkan Surat Utang Global

"Uang kas kita pada dasarnya terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) per akhir 2018 sebesar Rp 175,24 triliun, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2019 sebesar Rp 46,5 triliun, dan SiLPA 2020 (akhir Februari) sebesar Rp 50,13 triliun, atau pemerintah bisa memangkas anggaran proyek-proyek mercusuar yang bisa ditunda,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (14/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, merespon pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, yang mengungkapkan Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar, saat pandemi covid-19, yang nilainya mencapai US\$ 4,3 miliar atau Rp 68,6 triliun (kurs Rp 16.000).

"Ini adalah penerbitan

terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemik covid-19 terjadi," kata Sri Mulyani, Selasa (07/04/2020).

"Ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond

jangka panjang cukup kuat," kata Menteri Keuangan tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI ini langsung mengomentari kebijakan Sri Mulyani, menurut Anis pemerintah tidak harus terburu-buru menerbitkan surat utang global atau global bond dengan tenor yang sangat panjang.

Anis prihatin jika generasi penerus Indonesia kelak harus menanggung utang negara bertonor 10, 30, sampai 50 tahun.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa dari data yg ada, cadangan devisa Indonesia saat ini masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah.

"Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 tercatat sebesar US\$ 121 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan



pembiayaan 7,2 bulan impor, yang artinya posisi cadangan devisa ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor", papar Anis.

Lebih lanjut lagi Anis menyarankan, dari pada menerbitkan global bond, lebih baik menggunakan dana yang ada.

Menurut Doktor lulusan Universitas Airlangga ini, Pemerintah per akhir Februari 2020 masih memiliki uang kas lebih dari Rp 270 triliun.

"Uang kas kita pada

dasarnya terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) per akhir 2018 sebesar Rp 175,24 triliun, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2019 sebesar Rp 46,5 triliun, dan SiLPA 2020 (akhir Februari) sebesar Rp 50,13 triliun, atau pemerintah bisa memangkas anggaran proyek-proyek mercusuar yang bisa ditunda," demikian urai Anis mengakhiri.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**drh. H. Slamet**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar IV

**Gaji Anggota DPR untuk  
Kota Sukabumi, Diterima  
Simbolis Walikota**

*Bantuan ini berupa gaji satu bulan yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Sukabumi.*

# Gaji Anggota DPR untuk Kota Sukabumi, Diterima Simbolis Walikota

Bantuan ini berupa gaji satu bulan yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Sukabumi

## drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar IV

Sukabumi (07/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menyumbangkan gajinya untuk percepatan penanggulangan Covid-19 di Kota Sukabumi. Bantuan ini dinilai sangat berarti di tengah pandemi Covid-19 di daerah.

Bantuan tersebut langsung diterima Walikota Sukabumi Achmad Fahmi yang diserahkan anggota DPR RI Slamet, hari ini Selasa (07/04).

"Bantuan ini berupa gaji satu bulan yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Sukabumi," ujar anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi PKS di Balai Kota Sukabumi.

Langkah ini sebagaimana

wali kota Sukabumi yang telah menginfakan gajinya selama 4 bulan. Sehingga, kata politisi PKS ini, ia juga ikut menginfakan gaji anggota DPR RI sebagai bentuk kepedulian kepada warga di dapilnya khususnya Pemkot Sukabumi. Tujuan utama dilakukan penyerahan gaji ini menurut dia, agar langkah penanganan Covid-19 di daerah lebih maksimal lagi.

Slamet juga mengatakan, aksinya ini bukan hanya dirinya saja. Di seluruh Indonesia, semua dewan PKS baik pusat, propinsi maupun kabupaten kota melakukan hal yang serupa atau sama. Karena FPKS menyadari, menurut keterangannya, setiap daerah

menghadapi situasi serba sulit baik dari sisi anggaran maupun logistik penunjang pada penanganan wabah covid-19 ini.

Sebelumnya ketua kelompok komisi IV DPKS ini juga telah menggiatkan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah masjid di Kota/Kabupaten Sukabumi. Upaya lainnya dengan membagikan masker di sarana umum seperti terminal bus Sukabumi.

"Saya atas nama Pemkot Sukabumi dan warga Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan anggota DPR RI dapil Sukabumi drh Slamet," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Pemkot berharap, ada anggota DPR lainnya dapil Sukabumi yang mengikuti langkah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut. Hal itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah khususnya wakil rakyat dalam penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi. Nantinya sejumlah bantuan ini akan digunakan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.



# Bantu Ketahanan Pangan Keluarga Terdampak Covid-19, Toriq Bagikan 3,25 Ton Beras

Jika ketahanan ekonomi sebuah keluarga mengalami masalah maka sesungguhnya keluarga tersebut menjadi keluarga yang rentan. Implikasi keluarga rentan bagi kehidupan sosial masyarakat sangat besar, diantaranya akan timbul permasalahan kejahatan dan permasalahan keamanan di tengah-tengah masyarakat

## KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (10/04) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyampaikan bahwa keluarga yang merupakan elemen terkecil dari masyarakat adalah yang paling merasakan dampak dari wabah Covid 19 ini.

"Pelaksanaan pencegahan penyebaran covid 19 berupa social distancing, himbauan bekerja dirumah sudah pasti berdampak pada masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian seperti pedagang kecil, tukang ojek, ojol, pedagang

keliling dan jasa angkot serta yang lainnya" ujar Toriq.

Ekonomi keluarga adalah salah satu fungsi ketahanan keluarga. Ketika fungsi ekonomi keluarga tidak stabil maka rentan terhadap penyakit sosial.

"Jika ketahanan ekonomi sebuah keluarga mengalami masalah maka sesungguhnya keluarga tersebut menjadi keluarga yang rentan. Implikasi keluarga rentan bagi kehidupan sosial masyarakat sangat besar, diantaranya akan timbul

permasalahan kejahatan dan permasalahan keamanan di tengah-tengah masyarakat", ungkapnya.

Toriq meminta agar Pemerintah harus hadir dalam menjaga keluarga-keluarga rentan ini.

Namun jika hanya menunggu dari pemerintah saja tidaklah bijak. Seluruh elemen bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi dikeluarganya harus gerak cepat membantu, tambahanya.

"PKS sesuai dengan slogannya berkhidmat untuk rakyat maka melalui kebijakannya pada bulan April ini Fraksi PKS kembali memotong gaji setiap Anggota Dewannya untuk membantu masyarakat kecil. Terutama kepada keluarga-keluarga yang rentan akibat wabah covid 19. Pemotongan gaji ini dikonversi kedalam bentuk sembako", ujar Toriq.

Selanjutnya Anggota komisi I ini menyampaikan bahwa beliau memberikan bantuan sembako berupa 3.25 ton beras bagi masyarakat



terdampak ekonomi akibat wabah Covid 19 ini di Dapilnya sejak Kamis kemarin (9/04/20). Terutama untuk masyarakat kecil berpendapatan harian, seperti ojek online, buruh bangunan, pedagang keliling dan lainnya.

"Harapan kami dengan

bantuan tersebut maka fungsi ekonomi keluarga masyarakat yang terdampak Covid 19 ini dapat terjaga. Dan keluarga-keluarga di Indonesia memiliki ketahanan keluarga yang kuat dalam menghadapi wabah ini", Tutup Toriq.

# Lawan Covid-19, Junaidi Auly Serahkan APD ke RS Abdul Moeloek Lampung

Saya berharap dengan bantuan ini bisa membantu dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi covid-19 di Lampung,"

**Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung

Lampung (12/04) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Junaidi Auly menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, thermometer gun, strong acid, dan masker ke Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Menurutnya, penyerahan APD, dan lainnya sebagai upaya dalam melawan covid-19 di provinsi Lampung.

"Saya berharap dengan bantuan ini bisa membantu dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi covid-19 di Lampung," kata Junaidi di RS

Abdul Moeloek, Bandar Lampung. (Minggu, 12/04/2020)

Bantuan ini langsung diterima oleh perwakilan RS Abdul Moeloek, ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Junaidi Auly atas bantuannya untuk RS dan tentu kepeduliannya dalam memutus rantai covid-19 ini.

Anggota DPR Dapil Lampung II ini mengatakan, saat ini dibutuhkan peran semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kita harus bantu tenaga medis dengan melakukan aktivitas di rumah saja, dan terus mendoakan agar mereka selalu diberikan

kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah dalam melayani warga Lampung.

Junaidi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada dokter dan tenaga kesehatan yang terus bekerja keras dalam membantu pasien positif corona di seluruh Indonesia.

"Sebagai wakil rakyat dan atas nama rakyat Lampung khususnya, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan pada bangsa ini, semoga Allah membalas semua kerja keras yang dilakukan dan semoga wabah ini bisa segera selesai," tutup Junaidi



# Salurkan Bantuan Akibat Covid-19, Rafli Berbagi dengan Tunanetra

Sebaiknya Pemda harus memperhatikan betul saudara kita yang terbatas bergerak, terutama dalam kondisi saat ini

## RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Aceh

Banda Aceh (11/04) — Dampak Wabah Covid-19 membuat para tunanetra tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dan mencari nafkah seperti memijat sebagai salah satu profesi yang dilakukan selama ini.

Kondisi demikian telah mengundang perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rafli, untuk menyalurkan bantuan berupa beras bagi tunanetra yang ada di kota Banda Aceh.

Bantuan diserahkan melalui Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) dan pengurus DPD PPD1 (Perkumpulan Penyandang

Disabilitas) di kawasan Lam Lagang Kota Banda Aceh, Sabtu (11/04).

Melalui pertemuan, salah seorang tunanetra menyampaikan harapan kepada Pemerintah Aceh, agar terus memperhatikan mereka.

"Kami berharap perhatian Pemerintah, seperti penyaluran bantuan program sosial, apa lagi kami dengar ada bantuan dari pemerintah namun untuk saat ini belum kami terima" ujar M. Nur, salah satu penyandang disabilitas

"Kami juga berharap dapat dibantu berbagai macam fasilitas yang dapat kami

gunakan untuk menunjang ekonomi," imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Rafli juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa peduli dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan.

"Sebaiknya Pemda harus memperhatikan betul saudara kita yang terbatas bergerak, terutama dalam kondisi saat ini," ungkap Rafli.

Dalam kunjungan sosial ke Sekretariat penyintas tunanetra itu, turut hadir pula Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad serta Ketua Satgas DPD PKS Banda Aceh.



Ringankan Beban Masyarakat  
Terdampak Covid-19

# Ledia Hanifa Berbagi Bahan Pangan

Sambil terus mendorong dan mengawasi pelaksanaan program bantuan pemerintah, kita ulurkan bantuan kita pada sesama warga negara. Semakin cepat, luas, sinergis dan berkesinambungan tentu lebih baik.

**Hj. LEDIA HANIFA  
AMALIA, S.Si.,  
M.Psi.T**

Anggota DPR RI Dapil Jabar I

Bandung (13/04) — Kegiatan kunjungan ke daerah pemilihan (kundangpil) yang biasanya diisi dengan melakukan pertemuan bersama warga tak dapat dilakukan sejak situasi pandemik Covid-19 melanda Indonesia.

Namun aleg PKS dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi, Ledia Hanifa Amaliah, tidak berhenti menyumbang silaturahmi kepada warga.

Pada akhir pekan lalu, Ledia menyampaikan bantuannya kepada warga masyarakat di beberapa Kecamatan di Kota Bandung.

"Warga di Kota Bandung banyak yang terdampak langsung dengan pandemik Covid-19 ini. Kepedulian kita kepada mereka hanyalah bagian kecil dari upaya untuk saling berpadu meringankan beban masyarakat," kata Ledia usai menitipkan bahan pangan bagi warga ke tokoh masyarakat di daerah Ujung Berung



Ledia menyebutkan saat ini tidak hanya warga miskin yang langsung terdampak covid-19 namun juga warga kelas menengah yang kini menjadi rawan miskin dan bisa berubah menjadi penduduk miskin baru di negeri ini.

"Yang kita khawatirkan, jumlah masyarakat terdampak semakin bertambah karena warga yang selama ini tidak masuk dalam data penduduk miskin pun kini mulai mengalami kesulitan. Utamanya mereka yang selama ini tergolong masyarakat berpendapatan harian, pelaku usaha mikro dan kecil, para buruh, pekerja kontrak juga pekerja mandiri lainnya," ujarnya.

Keluarga miskin dan rawan miskin yang terdampak covid-19 ini menurut Ledia sudah selayaknya mendapatkan ban-

tuhan dari pemerintah. Namun, diakuiinya, besaran, cakupan dan kecepatan bantuan yang dibutuhkan tidak selalu sesuai harapan. Di sinilah peran gotong royong dan kepedulian bersama harus dimunculkan.

"Sambil terus mendorong dan mengawasi pelaksanaan program bantuan pemerintah, kita ulurkan bantuan kita pada sesama warga negara. Semakin cepat, luas, sinergis dan berkesinambungan tentu lebih baik. Karena itu aleg, pengurus serta kader PKS sejak awal muncul situasi pandemik covid-19 sudah secara sendiri-sendiri maupun terstruktur turun tangan membantu masyarakat dengan segala cara yang dimungkinkan. Ada yang melakukan penyemprotan desinfektan gratis, pemberian bantuan sembako, sumbangan

APD bagi tenaga medis dan banyak lagi termasuk dengan melakukan pemotongan gaji bagi para pejabat publik untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 sejak bulan Maret 2020," urai Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Pembagian bahan pangan bagi masyarakat dalam kundangpil kali ini dilakukan Ledia pada lebih dari 1000 KK di Kota Bandung, diantaranya dari Kecamatan Andir, Cidadap, Batununggal, Cibiru, Ujung Berung, Bandung Kidul dan Bojongloa Kaler.

"Insya Allah saya, aleg PKS lain dan juga para kader PKS lainnya masih akan gotong royong bersama masyarakat. Sebab ini pandemik Covid-19 ini adalah musibah bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama pula untuk menghadapinya," tutup Ledia.

# Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid-19, Sakinah Bagikan Beras Gratis

"Hari ini saya bagikan tiga ton beras di tiga titik di Kota Palu. Insha Allah setelah ini, akan kami lakukan juga di kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulteng

Palu (11/04) -- Dampak pandemi Covid-19 kian hari kian meningkat dirasakan masyarakat luas. Pandemi global virus corona turut andil mengguncang stabilitas perekonomian masyarakat luas.

Kondisi ini menggerakkan anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, yang turut andil meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 dengan membagikan tiga ton beras gratis bagi warga kota Palu Jumat, (10/04/2020).

Hingga hari Jumat, Sakinah telah menyalurkan beras gratis sebanyak tiga ton kepada warga Kota Palu dan

akan terus dilakukannya secara bertahap pada hari-hari ke depan.

"Hari ini saya bagikan tiga ton beras di tiga titik di Kota Palu. Insha Allah setelah ini, akan kami lakukan juga di kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah," kata Sakinah.

Tiga titik awal penyaluran bantuan beras gratis di Kota Palu yaitu Kalikoa Kelurahan Ujuna, jalan Bayam Komplek pasar Inpres Manonda dan Jalan Wahid Hasyim kelurahan Kampung Baru.

"Kami pilih Kota Palu sebagai kegiatan pertama penyaluran bantuan ini, pertama karena Palu merupakan sentral atau

ibukotanya Sulawesi Tengah dan juga merupakan daerah yang belum lama terkena bencana, sekarang ada lagi bencana wabah. Selain itu, yang tidak dapat kami pungkiri, bahwa Kota Palu adalah basis konstituen kami," terang politikus perempuan asal Partai Keadilan Sejahtera dapil Sulawesi Tengah.

Tiga ton beras yang diberikan tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari kantong pribadinya. Hal ini sesuai dengan komitmen seluruh anggota dewan Fraksi PKS bahwa gaji bulan Maret dan April dipotong untuk penanggulangan Covid-19.

"Untuk gaji Maret sudah dialokasikan dalam bentuk bantuan untuk pembelian APD untuk tenaga kesehatan dan medis, serta bantuan untuk penanggulangan virus secara langsung. Kemudian gaji April, dialokasikan untuk merekamereka yang terdampak," terang Sakinah.

Turut hadir dalam pembagian beras gratis ini



struktur DPW PKS dan ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiah. Pembagian bantuan selanjutnya akan dilakukan di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tengah dengan berkoordinasi dengan struktur PKS serta melibatkan anggota dewan yang lain.

"Untuk di kabupaten lainnya, kami juga akan koordinasikan dengan struktur partai, mulai dari DPD nya sampai struktur paling bawah dan alegnya," pungkas Sakinah.

Bantuan beras yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban

perekonomian masyarakat terdampak Covid-19. Idris, salah satu warga kota Palu sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan beras tersebut. Pasalnya, sejak sebulan ini pendapatannya turun drastis karena tidak ada pelanggan yang menambal ban di bengkelnya.

"Saya tidak menyangka hari ini dapat bantuan beras, alhamdulillah. Sejak sebulan ini pendapatan saya memang turun drastis. Sejak ada Corona ini, hampir sebulan sudah tidak ada lagi orang yang datang tempel ban di bengkelku," ungkap Idris.

# Anggota DPR RI Sumbar II Bersama LKKS Bagikan Ribuan Paket Sembako

Alhamdulillah disaat wabah melanda, masih banyak yang tergerak memberikan bantuan. Terimakasih kita ucapkan kepada para dermawan baik dari lembaga maupun pribadi yang menyalurkan bantuannya melalui LKKS Sumbar

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (10/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina tetap bergerak di daerah pemilihannya di sela-sela menjalankan Rapat-Rapat Kerja Virtual DPR RI untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial demi membantu mengurangi dampak ekonomi masyarakat Sumbar dengan menyediakan ribuan paket sembako untuk rakyat.

"Saat ini lokasi saya lebih banyak di dapil daripada di Jakarta, sehingga kendala tempat, jarak dan waktu tidak terlalu bermasalah untuk bertemu masyarakat. Seiring

dengan rapat-rapat kerja dari jarak jauh dengan metode teleconference, sudah sebagai tugas kami anggota DPR tetap memberi kontribusi kepada masyarakat di masing-masing daerah pemilihan guna mengurangi dampak covid-19", terang Nevi.

Anggota DPR RI komisi VI yang sangat konsern terhadap UMKK ini mengatakan, saat ini ia bersama LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) Sumatera Barat, akan menyusun tahapan-tahapan pembagian paket sembako ke rumah-rumah warga. Setiap ta-

hap berdurasi satu pekan akan membagi 1.000 paket dimana setiap paket terdiri dari beras sebanyak 5 kilogram, gula pasir, minyak goreng, mie instan.

Paket sembako yang disalurkan di Sumatra barat ini, kata Nevi, bukan hanya dari anggaran umbudnya saja. Namun banyak pihak baik lembaga maupun individu termasuk para pemda dan para dermawan dari perantau Minang turut berkontribusi.

Ia sangat terharu begitu banyak tindakan saling bahu-membahu memberikan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak wabah ini.

"Alhamdulillah disaat wabah melanda, masih banyak yang tergerak memberikan bantuan. Terimakasih kita ucapkan kepada para dermawan baik dari lembaga maupun pribadi yang menyalurkan bantuannya melalui LKKS Sumbar. Saya dapat memastikan, bantuan dari dermawan ini akan sampai kepada yang membutuhkan," ungkapnya.

Pandemi Covid-19, lanjut



Politisi PKS ini, telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya. Sungguh berat beban yang harus ditanggung mereka saat ini.

Bahkan warga yang sebelumnya hampir miskin jatuh ke dalam kelompok miskin saat ini. PHK terjadi dimana-mana menjadi fenomena yang tidak dapat terbendung lagi.

Banyaknya masyarakat yang terdampak diharapkan menjadi perhatian bersama. Anggota DPR FPKS ini diharapkan dinas terkait untuk memperkuat verifikasi dan validasi (Verival) data yang masuk.

Nevi berkeyakinan, akibat Covid-19 semakin banyak keluarga kurang mampu baru. Berarti banyak data baru untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang harus dimasukkan dan diverifikasi, terutama oleh dinas sosial baik

provinsi maupun kab./kota.

Menurut wakil rakyat dari PKS ini menilai sebagiannya data yang didapat dari lurah atau Walingari kurang langsung diverifikasi dan divalidasi. Agar pemberian bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih.

"Biar keluar uang untuk verifikasi asalkan datanya valid. Tidak terjadi penumpukan bantuan kepada orang yang sama," tegasnya.

"Saya akan berusaha terus untuk mengusahakan sebisa mungkin memberikan paket sembako setelah beberapa pekan lalu telah membagi sanitazer. Kini yang sangat dibutuhkan adalah sembako seiring dampak pembatasan-pembatasan aktivitas yang berpengaruh pada ekonomi keluarga. Pekan ini dibagikan 1.000 paket sembako, pekan depan rencananya 1.000 paket lagi", tutup Nevi Zuairina.

## PROFIL

# DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH.,MH.



## KELUARGA

### Miniatur kekuatan negara

Dalam program #KeluargaPKS kali ini kita akan berkenalan dengan seorang legislator asal "Negeri Jawara" atau Banten yakni Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. lahir di Tangerang, Banten, 17 September 1966.

Mengawali kariernya sebagai pengusaha, Achmad Dimiyati Natakusumah terjun ke dunia politik. Merupakan seorang politikus ulung, malang melintang di dunia "persilatan politik". Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang dan Wakil Ketua MPR RI.

Sejak belia, Pak Dimiyati aktif dalam organisasi dan pembelajar cepat. Saat usia 24 tahun pernah menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pandeglang sampai tahun 1995 dan menjadi Ketua HIPMI Jawa Barat periode 1995-2000. Pak Dimiyati juga sebagai Ketua KONI Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2000 hingga 2010.

Bersama istrinya Hj. Irna Narulita Alhamdulillah dikarunia tiga buah hati, yakni Rizka Amania Ramadhani Natakusumah, Rizki Aulia Rahman Natakusumah dan Risyah Azzahra Rahim-

ah Natakusumah. Keluarga ini sangat aktif dalam organisasi dan politik, namun demikian komunikasi dan interaksi intensif dilakukan satu sama lain.

Pesan Pak Dimiyati untuk keluarga Indonesia: "Keluarga itu miniatur state, kekuatan negara itu ada pada keluarga, maka mulailah dari keluarga, bila keluarga rapuh maka negara rapuh juga, dan komponen dalam keluarga harus memiliki dasar (agama) pedomannya (Alquran dan hadist) tupoksinya dan perannya masing-masing ibarat mengarungi di samudra luas tujuannya mencapai pantai harapan, ditengah lautan banyak angin panas hujan gelombang siang malam panas dingin bahkan tiba-tiba badai yg akan menerpa kapal, kapal tersebut diibaratkan keluarga. Jadi semua komponen dalam keluarga tersebut ujiannya akan datang setiap saat harus siap menghadapinya dengan tenang.

-seperti sekarang ini menghadapi covid19, harus saling membantu dan menjaga. menghadapi samudra yang ganas tersebut, harus siap peralatan bekal dan penunjuk arah agar cukup mencapai pantai kebahagiaan dengan banyak perubahan cuaca dan situasi kondisi, bisa mengikuti zaman, Maka kapal tersebut harus memiliki mesin peralatan dan bekalnya yang bagus dan sehat, mesin itu qolbu. (spiritual Quotient) SQ.

”

Keluarga itu *miniatur state*, kekuatan negara itu ada pada keluarga, maka mulailah dari keluarga, bila keluarga rapuh maka negara rapuh juga, dan komponen dalam keluarga harus memiliki dasar (agama) pedomannya (Alquran dan hadist) tupoksinya dan perannya masing-masing ibarat mengarungi di samudra luas tujuannya mencapai pantai harapan

SQ – *Spiritual quotient is going beyond your cognitive and emotional skills. It is acknowledging your mortality and thinking of what you could offer humanity. It is living in humility; bearing in mind that you are just a tiny compared to the vastness of the universe.*

#### SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. dapat mengikuti social media

Instagram :  
@dimiyatinatakusumah99

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)